



PUSAT DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Laporan Kinerja

PUSAT DATA & INFORMASI

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN

TRIWULAN I 2025



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA MAJU

✉ layananpusdatin@kkp.go.id

🌐 <https://portaldata.kkp.go.id/>



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wata'alla atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Triwulan I Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin serta memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdatin untuk meningkatkan kinerjanya, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

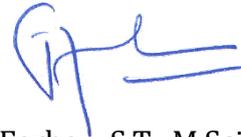
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2025, terdapat 20 (dua puluh) Indikator Kinerja, dimana 2 (dua) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, 2 (dua) secara semesteran, dan 16 (enam belas) secara tahunan.

Melalui capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025, Pusdatin mendapatkan penghargaan yaitu sebagai Top 5 Pembina Penyelenggara Inovasi Terbaik Kelompok Kementerian pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2025.

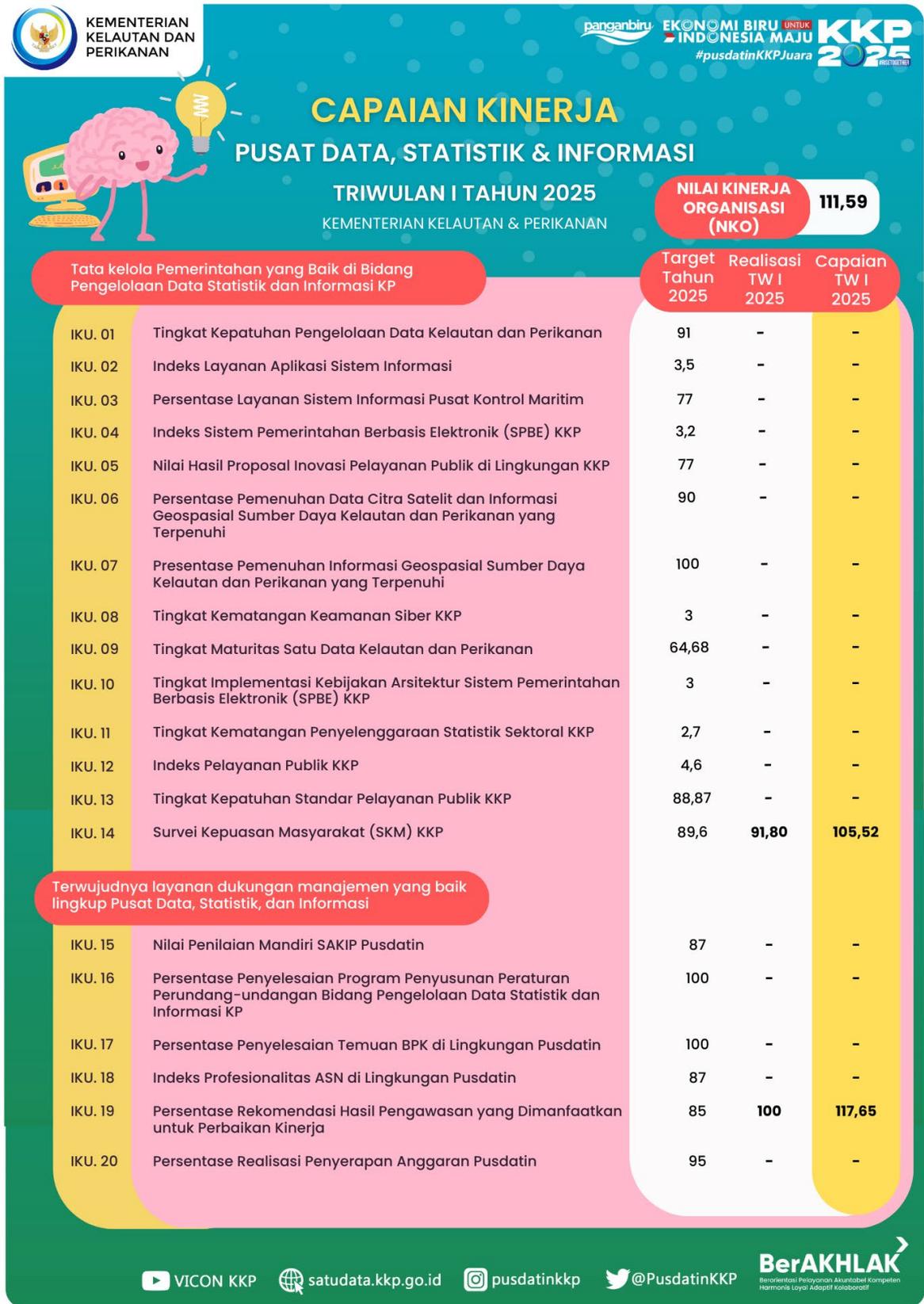
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal yang telah memberikan arahan, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2025 ini. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk triwulan berikutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 17 April 2025
Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Aulia Riza Farhan, S.T., M.Sci.Tech., Ph.D.
NIP. 197208122001121002



Gambar 1. Infografis Capaian Kinerja Pusdatin TW I 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti rekomendasi Bapak Sekretaris Jenderal pada Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Pusat Data, Statistik dan Informasi, yaitu: 1) Meningkatkan capaian indikator kinerja Tahun 2024 lebih baik dari capaian Tahun 2023; 2) Meningkatkan nilai komponen perencanaan, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas internal kinerja pada tahun 2025.

Pusdatin perlu menindaklanjuti rekomendasi diatas, dengan meningkatkan capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mengacu pada 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pada tahun 2025 Pusdatin memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, 2 (dua) secara semesteran, dan 16 (enam belas) secara tahunan.

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2025 pada aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*) diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **111,59%**, capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 114,69%, dikarenakan karena IKU tahun 2025 yang dihitung secara triwulanan hanya 2 (dua). Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Pusdatin Tahun 2025 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang diukur secara triwulanan dengan capaian lebih dari 100%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP dengan target sebesar 89,60, realisasi sebesar 91,80 atau mencapai 105,52%.
2. Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan target sebesar 85%, realisasi 100% atau mencapai 117,65%.

Realisasi Penyerapan DIPA Pusdatin per 31 Maret tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI dari pagu awal senilai **Rp 96.149.421.000,-** (pagu efektif senilai **Rp 27.107.719.000,-**) telah direalisasikan senilai **Rp 4.101.629,963,-** dengan persentase realisasi total anggaran adalah senilai **4,27%**, dengan sisa anggaran total senilai **Rp 92.047.791.037,-**. (sebelum efisiensi).

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden RI No.1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Kementerian Keuangan No:S-37/MK-02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran No:S-27/PB/2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Pemerintah, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Efisiensi* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan Efisiensi senilai **Rp 69.041.702.000,-** atau sebesar **71,81%** dari total pagu anggaran, sehingga anggaran yang bisa dimanfaatkan setelah efisiensi senilai **Rp 27.109.719.000,-**.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode-periode berikutnya, Pusdatin akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Usulan anggaran terkait sistem dan teknologi informasi agar dilakukan *clearance* oleh Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian PANRB sebagai data dukung review;
2. Meningkatkan Validasi Data Statistik untuk kebutuhan Pimpinan dan Stakeholder sebagai bentuk layanan data statistik Satu Data Indonesia;
3. Sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait digitalisasi di lingkungan KKP, saat ini portal KKP telah dilengkapi dengan fitur tanda tangan elektronik pada menu produk hukum, surat keputusan kepegawaian, dan pada menu perizinan. Saat ini juga sedang dibangun portal pegawai, sebagai pengembangan Aplikasi ePegawai KKP;
4. Meningkatkan penguatan keamanan siber di lingkup KKP secara menyeluruh, penguatan tidak bisa hanya difokuskan pada menambal kerentanan di sisi aplikasi saja. Masing-masing individu sebagai pengguna

infrastruktur jaringan dan teknologi informatika harus mempraktekan penggunaan internet secara bertanggungjawab dengan melakukan berbagai upaya seperti melakukan penggantian kata sandi secara berkala, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, serta menghindari penggunaan kembali kata sandi lama. Selain itu, pengguna juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam membuka tautan atau lampiran yang diterima melalui email atau pesan instan, mengingat metode *phishing* semakin canggih dan sulit dibedakan dari komunikasi resmi;

5. Disamping itu, kesadaran akan pentingnya memperbarui perangkat lunak secara rutin juga harus ditingkatkan. Pembaruan perangkat lunak, termasuk sistem operasi dan aplikasi, sering kali mencakup perbaikan terhadap celah keamanan yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan memastikan bahwa perangkat dan aplikasi selalu dalam versi terbaru, risiko serangan dapat diminimalkan secara signifikan;
6. Meningkatkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara tim keamanan siber dan seluruh pengguna teknologi informasi di lingkup KKP menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman dan tangguh. Dengan pemahaman dan komitmen bersama, kita dapat memperkuat ketahanan siber di lingkungan kerja kita dan mengurangi potensi ancaman yang dapat merugikan operasional serta keamanan data institusi kita. Bersama-sama menjadikan keamanan siber sebagai prioritas bersama demi kelangsungan dan keberlanjutan teknologi informasi yang andal dan terpercaya;
7. Melengkapi data *warehouse*, akses ke server basis data KKP dan API KKP;
8. Akan dilaksanakan implementasi operasional digitalisasi perizinan yang meliputi modul Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), Buku Kapal Perikanan (BKP), Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SKAT SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), serta akan dilaksanakan uji lapangan digitalisasi perizinan melibatkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, PSDKP, Pusdatin, yang akan dilaksanakan di pelabuhan terdekat;

9. Meningkatkan manajemen Sumber Daya Manusia atas dasar Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sistem Negara (ASN) dengan mendorong kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, diklat, dan seminar-seminar yang relevan; memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sebagai bentuk motivasi untuk terus meningkatkan kinerja; dan melakukan pemutakhiran data terkait riwayat pendidikan, pelatihan, seminar, dan workshop yang pernah diikuti oleh pegawai melalui aplikasi myASN secara berkala;
10. Melakukan pemantauan terhadap indikator kinerja setiap triwulan, agar realisasi dan capaian dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta untuk meningkatkan NKO Pusdatin di tahun yang akan datang;
11. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan agar dapat terlaksana sesuai dengan output dengan melakukan Dialog Kinerja setiap seminggu sekali melalui apel pagi dimana masing-masing Ketua Tim Kerja lingkup Pusdatin memberikan perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
12. Melakukan Monitoring terkait fasilitasi pelaksanaan Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).

Melalui capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025, Pusdatin mendapatkan penghargaan yaitu sebagai Top 5 Pembina Penyelenggara Inovasi Terbaik Kelompok Kementerian pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2025.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan Tim SAKIP Pusdatin akan melakukan evaluasi capaian secara berkala serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	8
1.3 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin	9
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin	14
1.3.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Informasi.....	15
1.3.4 Kelompok Jabatan Fungsional	19
1.4 Potensi	19
1.5 Permasalahan dan Tantangan.....	20
1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	22
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	24
2.1 Rencana Kerja Sekretaris Jenderal 2025-2029.....	24
2.3. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025.....	27
2.4. Program dan Kegiatan.....	28
2.5 Tindak Lanjut Rekomendasi.....	29
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	40
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja	46
3.3.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan.....	46
3.3.2 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	52
3.3.3 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim.....	55
3.3.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP.....	62

3.3.5 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	65
3.3.6 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	68
3.3.7 Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	71
3.3.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	73
3.3.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan.....	79
3.3.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP	83
3.3.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektorial KKP	86
3.3.12 Indeks Pelayanan Publik KKP.....	89
3.3.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP.....	92
3.3.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP	98
3.3.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin	102
3.3.16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP.....	106
3.3.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin.....	109
3.3.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin.....	112
3.3.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin.....	118
3.3.20 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin	121
3.4 Realisasi Anggaran.....	123
BAB 4 PENUTUP	126
4.1 Penghargaan.....	126
4.2 Rencana Tindak Lanjut	128
LAMPIRAN	132



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tim Kerja Lingkup Pusdatin Triwulan I Tahun 2025.....	9
Tabel 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin	15
Tabel 3. Sebaran Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Pegawai Pusdatin	17
Tabel 4. Distribusi Pegawai Pusdatin.....	18
Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin	19
Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2025	27
Tabel 7. Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi Tahun 2024 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan Target Pusat Data, Statistik dan Informasi Tahun 2025.....	32
Tabel 8. Hasil verifikasi capaian Indikator Kinerja Unit Organisasi level II Triwulan I Tahun 2025 lingkup Sekretariat Jenderal.....	35
Tabel 9. Indikator Kinerja Pusdatin Tahun 2025 pada Rencana Strategis KKP 2025-2029 ...	36
Tabel 10. Keselarasan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029.....	37
Tabel 11. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Triwulan I Tahun 2025.....	41
Tabel 12. Rencana Aksi Pusdatin Triwulan I Tahun 2025	43
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP.....	47
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi.....	53
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi.....	56
Tabel 16. Data Eselon I yang telah diintegrasikan ke dalam data warehouse PKM	57
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP	63
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik	66
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	69
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	71
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP.....	74

Tabel 22. Serangan Siber DDoS (Distributed Denial of Service)	76
Tabel 23. Serangan Siber Defacement.....	76
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan.....	80
Tabel 25. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP ..	84
Tabel 26. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP	87
Tabel 27. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Tahun 2024	90
Tabel 28. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	94
Tabel 29. Hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan I Tahun 2025	99
Tabel 30. Hasil Nilai Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan I Tahun 2025	99
Tabel 31. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP	99
Tabel 32. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin.....	103
Tabel 33. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	107
Tabel 34. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK.....	110
Tabel 35. Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN).....	113
Tabel 36. Kualifikasi bobot nilai 25 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN).....	114
Tabel 37. Kualifikasi bobot nilai 40 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN).....	114
Tabel 38. Kualifikasi bobot nilai 30 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN).....	115
Tabel 39. Kualifikasi bobot nilai 5 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)	115
Tabel 40. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin	116
Tabel 41. Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2025	119
Tabel 42. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin.....	119
Tabel 43. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin Triwulan I Tahun 2025	122
Tabel 44. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin...	122
Tabel 45. Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Triwulan I Tahun 2025	124
Tabel 46. Lampiran Dokumen Pendukung	137



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Infografis Capaian Kinerja Pusdatin TW I 2025	iii
Gambar 2. Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-20293	
Gambar 3. Struktur Organisasi Pusdatin TA 2025	9
Gambar 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	16
Gambar 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	18
Gambar 7. Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2025	40
Gambar 8. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2025.....	41
Gambar 9. Grafik Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP (%) Tahun 2020-2024.....	48
Gambar 10. Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Pendataan Kusuka dan Penyuluh Perikanan TW 1-2025	51
Gambar 11. Grafik Capaian IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks) Tahun 2020-2024.....	53
Gambar 12. Rapat Harmonisasi Aplikasi Data dan Informasi Lingkup Ditjen PDSPKP	54
Gambar 13. Grafik Capaian IKU Persentase Layanan Sistem Informasi PKM Tahun 2023-2024.....	56
Gambar 14. Dashboard platform Trello.....	60
Gambar 15. Rapat Pembahasan Integrasi Data dan Update Fitur Pengawasan Command Center	61
Gambar 16. Grafik Capaian IKU Indeks SPBE KKP Tahun 2020-2024.....	63
Gambar 17. Asistensi Clearance Belanja TIK SPBE KKP dengan Kemen PAN RB	64
Gambar 18. Pembahasan Draft Keputusan Menteri KP tentang Kebijakan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) SPBE KKP.....	64
Gambar 19. Grafik Capaian IKU Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP Tahun 2023-2024	67
Gambar 20. Penyampaian Rencana Inovasi Pelayanan Publik oleh Kementerian PANRB	68

Gambar 21. Grafik Capaian IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2024.....	70
Gambar 22. Grafik Capaian IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi Tahun 2023-2024.....	72
Gambar 23. Aspek Pengukuran dan Tingkat Kematangan Keamanan Siber.....	73
Gambar 24. Grafik Capaian IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP Tahun 2023-2024.....	74
Gambar 25. Situs KKP yang terdampak kebocoran data.....	78
Gambar 26. Jenis Malware pencuri data kredensial KKP.....	78
Gambar 27. Grafik Capaian IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2024.....	81
Gambar 28. Koordinasi Data Prioritas 2024 dan Daftar Data 2025 lingkup DJPKRL.....	82
Gambar 29. Pembahasan Draft Inmen KP Transformasi Digital.....	82
Gambar 30. Grafik Capaian IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP Tahun 2023-2024.....	85
Gambar 31. Grafik Capaian IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP Tahun 2023-2024.....	88
Gambar 32. Pembinaan Statistik Sektor.....	88
Gambar 33. Grafik Capaian IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Tahun 2023-2024.....	91
Gambar 34. Evaluasi hasil pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional Tahun 2024.....	92
Gambar 35. Grafik Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP Tahun 2021-2024.....	94
Gambar 36. penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI.....	97
Gambar 37. Validasi SKM TW I Tahun 2025.....	101
Gambar 38. Grafik Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2020-2024.....	104
Gambar 39. Rapat Penyiapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Monitoring Kinerja Individu.....	105
Gambar 40. Grafik Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP Tahun 2020-2024.....	107
Gambar 41. Rapat Koordinasi Pembahasan IKU Mandatory Peraturan Perundang-undangan lingkup KKP.....	108
Gambar 42. Grafik IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin Tahun 2020-2024.....	110
Gambar 43. Monitoring kegiatan penyelesaian temuan BPK lingkup Pusdatin.....	111

Gambar 44. Grafik IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Tahun 2020-2024 117

Gambar 45. Grafik IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin Tahun 2020-2024 120

Gambar 46. Grafik IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Tahun 2020-2024..... 122

Gambar 47. Capaian Realisasi Anggaran Pusdatin Triwulan I Tahun 2025 125

Gambar 48. Penghargaan Top 5 Pembina Penyelenggara Inovasi Terbaik Kelompok Kementerian pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) oleh Kementerian PANRB Tahun 2024..... 126



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai pengelolaan kinerja KKP tahun 2025 belum diterbitkan. Namun, ada beberapa peraturan menteri KKP yang relevan dengan kinerja KKP, seperti Peraturan Menteri KKP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, yang mengatur struktur dan tata kerja KKP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Pengelolaan Kinerja lingkup KKP pelaksanaannya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/SJ Tahun 2025, Tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pusdatin sebagai institusi yang mempunyai tugas memberikan layanan tentang informasi kelautan dan perikanan dituntut untuk selalu menyajikan data yang tepat waktu, akurat, lengkap dan berkelanjutan yang dibutuhkan oleh *stakeholders*, serta mendukung dan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden RI

Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025-2029.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarnya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkannya di Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.



Gambar 2. Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan difokuskan untuk meningkatkan: 1) produktivitas perikanan, 2) meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan, 3) menempatkan ekologi sebagai panglima guna keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan bagi generasi mendatang, 4) serta pembangunan inklusif yang menyasar para pelaku utama kelautan dan perikanan untuk menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui lima arah kebijakan pembangunan ekonomi biru kelautan dan perikanan, yaitu: (1) Memperluas Kawasan Konservasi Perairan; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; (4) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Pengelolaan Kinerja KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tahun 2025 mencakup berbagai aspek, termasuk efisiensi anggaran, penataan organisasi, dan pelaksanaan program prioritas seperti Asta Cita dan Ekonomi Biru. Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan pencapaian target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs, KKP menempatkan ekologi sebagai panglima guna mendukung lompatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (ekonomi biru) yang dapat terus dirasakan manfaatnya oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Penerapan konsep ekonomi biru tersebut diterjemahkan sebagai pembangunan ramah lingkungan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan sumber daya yang memberikan nilai tambah. Selain itu, ekonomi biru juga diyakini mampu mendorong pengelolaan perikanan secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi. Untuk itu dibutuhkan penyediaan akses internet, teknologi informasi, dan instrumen pengawasan berbasis satelit yang dapat memonitor perubahan sumber daya kelautan dan perikanan secara cepat dan sensor bawah laut yang dapat mengirimkan data-data hasil observasi.

KKP selaku penanggung jawab keanekaragaman hayati (kehati) laut dan pesisir telah berkomitmen melalui implementasi 5 program strategis Ekonomi Biru sampai tahun 2045 untuk melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan.

Penekanan pada pencapaian pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi dasar kerangka pikir RPJMN 2025-2029 untuk pengembangan SDM. Sehingga, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan nasional melalui salah satu misi dari asta cita (8 misi Kabinet Merah Putih, yaitu penguatan sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas). Peningkatan kualitas SDM dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan

melanjutkan pengembangan infrastruktur. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan sumber daya manusia KP juga dilakukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM. Pengelolaan sumber daya alam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan secara lestari berkelanjutan. Pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan secara lestari berkelanjutan menerapkan prinsip ekonomi biru, dengan arah kebijakan antara lain: (1) penguatan ekosistem pendukung, (2) peningkatan nilai tambah sektor eksisting/tradisional, (3) penguatan riset, inovasi, dan SDM terampil untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi biru, (4) peningkatan kesehatan, ketahanan dan produktivitas sumber daya kemaritiman, (5) peningkatan dan pemerataan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi biru, (6) optimalisasi jalur logistik, transportasi, dan perdagangan global, dan (7) optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam pengelolaan kinerja KKP 2025:

1) Efisiensi Anggaran

KKP mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp2,1 triliun, yang disetujui oleh Komisi IV DPR RI. Efisiensi ini diterapkan pada belanja barang dan belanja modal, dengan tujuan menjaga anggaran gaji ASN, operasional kantor, dan program prioritas.

2) Penataan Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, KKP melakukan penataan organisasi dan tata kerja.

3) Pelaksanaan Program Prioritas

KKP terus menjalankan program prioritas seperti Asta Cita dan Ekonomi Biru untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

4) Peningkatan Kualitas SDM

KKP fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan melalui berbagai program, seperti peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi serta riset.

5) Tugas dan Fungsi KKP

KKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.

Sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029, yaitu:

1. SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan Perikanan;
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
4. SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
5. SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas

Selain sasaran strategis, KKP juga akan fokus pada beberapa program prioritas, seperti pengembangan tambak garam, pengelolaan sampah plastik laut, dan pemberdayaan nelayan. KKP juga akan terus melakukan efisiensi anggaran untuk memastikan program prioritas tetap berjalan dengan baik. Sebagai contoh, untuk mencapai sasaran produksi garam, KKP akan melakukan terobosan dengan mengimplementasikan modelling ekstensifikasi tambak garam di Nusa Tenggara Timur dan intensifikasi melalui modernisasi teknologi produksi garam di beberapa provinsi. KKP juga akan terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan laut dengan program Bulan Cinta Laut (BCL) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mendukung prioritas nasional, KKP memperkuat Swasembada Pangan melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam, pengelolaan kawasan konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah dan pemasar hasil perikanan. Termasuk bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional, penyediaan pangan bergizi dan bermutu bagi masyarakat, penguatan pengawasan dan pencegahan *IUU Fishing*, serta pembangunan Kampung Nelayan/Budidaya Modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Pusdatin KKP (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan) memberikan dukungan dalam arah kebijakan KKP 2025-2029 dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyediakan data serta informasi yang akurat dan relevan. Dukungan ini membantu KKP dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, melalui elaborasi:

1) Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pusdatin KKP bertugas mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber, termasuk data statistik perikanan, data produksi, data pasar, data lingkungan laut, dan data terkait isu-isu strategis lainnya. Data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna.

2) Pelayanan Informasi

Pusdatin KKP menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada internal KKP (pimpinan, jajaran, dan staf) serta eksternal (masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya). Informasi ini dapat berupa laporan, analisis, grafik, atau format lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3) Dukungan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan

Data dan informasi yang disediakan Pusdatin KKP digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan KKP. Ini termasuk perencanaan anggaran, penentuan target, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan strategis.

4) Evaluasi dan Peningkatan

Data dan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh Pusdatin KKP juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan KKP. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja KKP di masa depan.

5) Integrasi dengan Sistem Informasi Nasional

Pusdatin KKP juga berupaya untuk mengintegrasikan sistem informasi KKP dengan sistem informasi nasional lainnya, seperti sistem informasi pangan, sistem informasi lingkungan, dan sistem informasi lainnya. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan informasi di seluruh sektor pemerintahan.

Contoh Dukungan Pusdatin KKP, antara lain:

1) Data Perikanan

Pusdatin KKP menyediakan data produksi ikan, jenis ikan, wilayah perikanan, dan data terkait lainnya yang digunakan untuk perencanaan produksi, pengelolaan sumber daya perikanan, dan pengendalian *illegal fishing*.

2) Data Lingkungan

Pusdatin KKP menyediakan data terkait kondisi laut, kualitas air, dan kondisi ekosistem pesisir yang digunakan untuk perencanaan konservasi, pengelolaan sumber daya pesisir, dan mitigasi bencana.

3) Data Pasar

Pusdatin KKP menyediakan data harga ikan, volume perdagangan, dan data terkait lainnya yang digunakan untuk perencanaan pemasaran, pengelolaan pasar, dan pengendalian inflasi harga ikan.

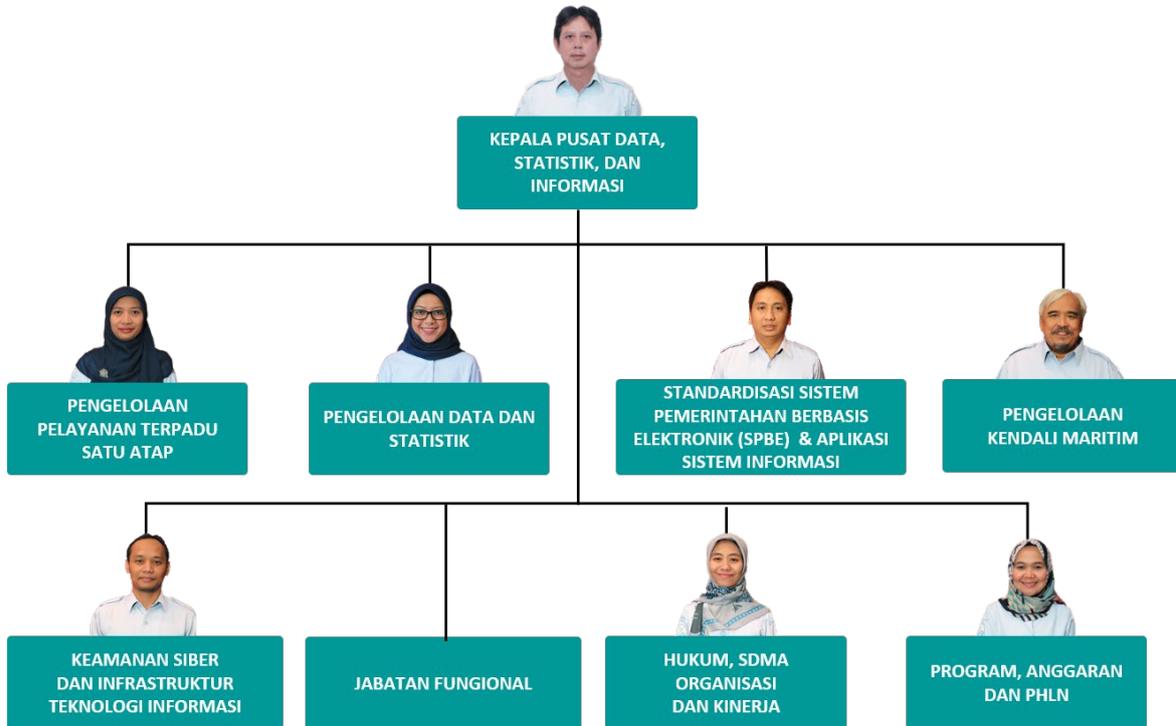
Dengan dukungan Pusdatin KKP yang kuat, KKP dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan nasional, terutama dalam mendukung RPJMN 2025-2029.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin, sasaran strategis kegiatan/program, arah kebijakan yang ditetapkan, dan sebagai laporan atas realisasi, capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin serta memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdatin untuk meningkatkan kinerjanya, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

1.3 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin



Gambar 3. Struktur Organisasi Pusdatin TA 2025

Sesuai dengan Surat Tugas Kapusdatin Nomor NOMOR B.96/SJ.7/KP.440/I/2025 tanggal 8 Januari 2025, dan dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka telah ditetapkan Pusdatin memiliki 7 (tujuh) Tim Kerja, dengan uraian fungsi sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1. Tim Kerja Lingkup Pusdatin Triwulan I Tahun 2025

Nomor	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
1.	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	Pemenuhan indeks pelayanan publik KKP
		Tingkat kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	a. Dukungan pengelolaan pelayan terpadu satu atap di lingkungan KKP

Nomor	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan dan pemenuhan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan b. Pelaksanaan pembangunan zona integrasi menuju WBK/WBBM
2.	Pengelolaan Data dan Statistik	Tingkat Kepatuhan Pengelola data Kelautan dan Perikanan (persen)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan standardisasi dan statistik, pengelompokan data, dan metodologi statistik, serta pengelolaan master data kelautan dan perikanan; b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi data statistik kelautan dan perikanan; c. Melakukan koordinasi, analisis, penyajian, penyebarluasan data kelautan dan perikanan; d. Penyusunan dan analisis data tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan; e. Melakukan monitoring dan evaluasi data kelautan dan perikanan.
		Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (persen)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengelolaan data kelautan dan perikanan mendukung implementasi Satu Data Indonesia; b. Melaksanakan tugas sebagai Walidata Kementerian Kelautan dan Perikanan. c. Melakukan pemenuhan tingkat maturitas satu data kelautan dan Perikanan
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektorial KKP (nilai)	Melakukan pemenuhan indeks tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektorial KKP
3.	Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan Aplikasi Sistem Informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemenuhan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP; b. Koordinasi pelaksanaan clearance anggaran teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP dengan instansi terkait; c. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan KKP

Nomor	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	Melakukan pemenuhan implementasi kebijakan arsitektur SPBE KKP.
		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka evaluasi layanan aplikasi; b. Melakukan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik lingkup KKP c. Melakukan monitoring dan evaluasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
		Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemenuhan indeks layanan sistem dan teknologi informasi b. Melaksanakan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP.
4.	Pengelolaan Kendali Maritim	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi merupakan sistem untuk menyediakan data dan informasi yang terpusat untuk dapat menggambarkan situasi secara real time; b. Melakukan pengelolaan data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; c. Melakukan visualisasi data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan hasil kajian dan analisis data untuk kebutuhan decision support system; d. Melakukan pengelolaan operasional dan pemeliharaan aset command center dan komputasi lingkup KKP; e. Melakukan integrasi sistem informasi pada unit kerja eselon I dan data citra berbasis satelit yang dimiliki oleh KKP f. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase layanan sistem informasi pengelolaan kendali maritim.

Nomor	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
		Persentase pemenuhan data citra satelit untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (persen)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka persentase pemenuhan data citra satelit sumber daya kelautan dan perikanan; b. Melakukan penyediaan sistem yang terintegrasi dan infrastruktur sistem satelit nano untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan fungsi kontrol, monitoring, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyediaan transponder dan sistem monitoring situasi maritim; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan integrasi dari beberapa sistem informasi dan unit kerja eselon I yang telah ada, serta data citra berbasis satelit yang dimiliki KKP.
5.		Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka persentase pemenuhan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; b. Melakukan penyediaan sistem yang terintegrasi dan infrastruktur sistem satelit nano untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan fungsi kontrol, monitoring, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyediaan transponder dan sistem monitoring situasi maritim; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan integrasi dari beberapa sistem informasi dan unit kerja eselon I yang telah ada
6.	Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kegiatan keamanan siber dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi; b. Melakukan kegiatan pengelolaan bandwidth dan infrastruktur jaringan KKP pusat.

Nomor	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
7.	Hukum, Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Kinerja	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Nilai Rekonsiliasi/Verifikasi Kinerja Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan laporan kinerja, laporan tahunan, SAKIP.
		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan data statistik dan informasi KP. b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan draf Perjanjian kerjasama
		Indeks Profesionalitas ASN Pusdatin (indeks)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pusdatin; b. Melakukan pengelolaan layanan kearsipan dan persuratan.
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan untuk tindak lanjut rekomendasi dalam rangka pemenuhan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin.
8.	Program, Anggaran dan PHLN	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan PIPK.
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin.

Nomor	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
		Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase realisasi penyerapan anggaran Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan anggaran APBN/Pinjaman Hibah Luar Negeri; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait pengadaan barang dan jasa; d. Penyiapan laporan keuangan dan BMN, pencatatan BMN.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. koordinasi penyusunan, perencanaan, standarisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi penyusunan, perencanaan, standarisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- d. koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standarisasi, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;

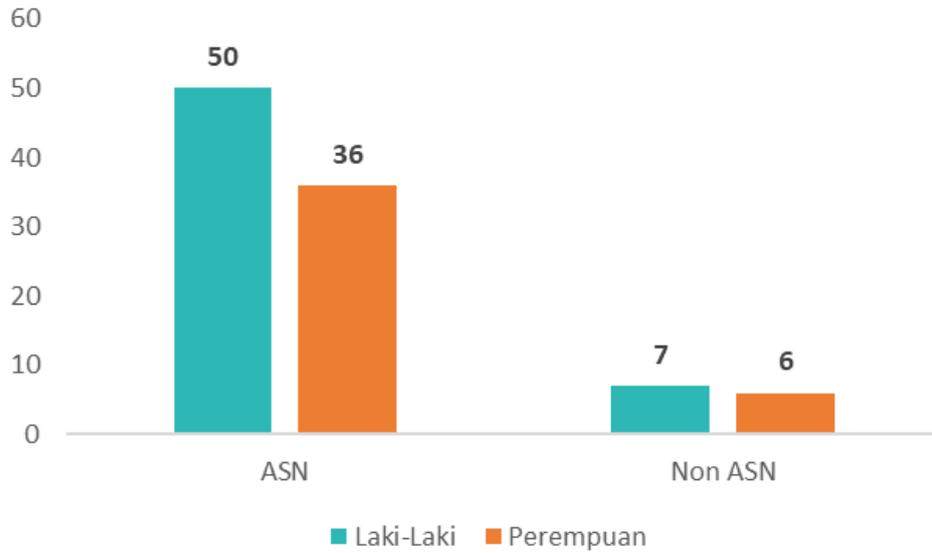
- e. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
- f. koordinasi standarisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem informasi geospasial sumber daya kelautan perikanan;
- g. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi keamanan siber;
- h. koordinasi standarisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
- i. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusat Data dan Informasi; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Pusat dan informasi.

1.3.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Informasi

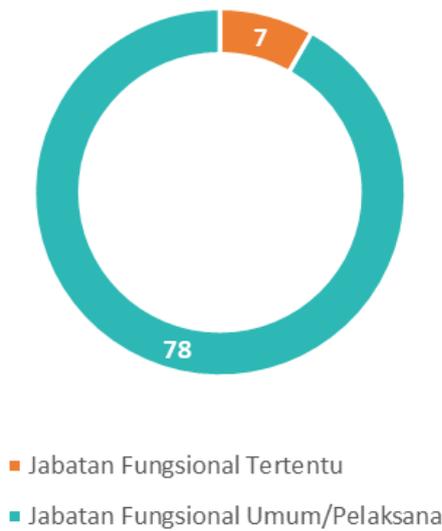
Dalam rangka mengemban tugas, Pusdatin didukung oleh 99 orang pegawai yang terdiri dari 86 ASN dan 13 Non ASN. Sedangkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sejumlah 78 orang dan 7 orang Pegawai Fungsional Umum (JFU), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin

Jabatan	Jumlah (orang)
Eselon II	1
Jabatan Fungsional Tertentu	78
Jabatan Fungsional Umum	7
PPNPN/Non ASN	13
Total	99



Gambar 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

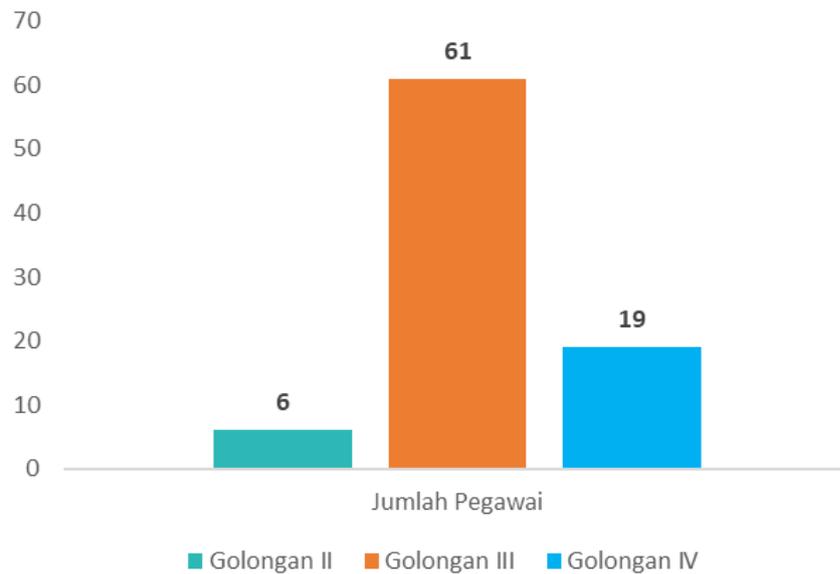
Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai ASN di Pusdatin mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

:

Tabel 3. Sebaran Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Pegawai Pusdatin

NAMA JABATAN/JENJANG JFT	AHLI MADYA			AHLI MUDA		AHLI PERTAMA			MAHIR		TERAMPIL		
	S1	S2	S3	S1	S2	D4	S1	S2	D3	SMA	D3	S1	SMA
ANALIS KEBIJAKAN								1					
ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN					1								
ANALIS SDM							1						
ARSIPARIS									1				
PENATA PERIZINAN		1		1		1	2						
PERENCANA		1		1									
PRANATA KEUANGAN APBN													1
PRANATA KOMPUTER	2	5		5	6		22			1	1		1
STATISTISI	2	4		2	1		9						
SURVEYOR PEMETAAN			2				2					1	

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 19 orang golongan IV, 61 orang golongan III, dan 6 orang golongan II.



Gambar 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Distribusi aparatur Pusdatin baik Aparatur Sipil Negara maupun Non ASN sesuai dengan Jabatan Fungsional dan pendidikan pada Tim Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Pegawai Pusdatin

TIM KERJA	ASN/ SMA	ASN/ D1	ASN/D3	ASN/D4	ASN/S1	ASN/S 2	ASN/S 3	NONASN/ SMA	NON ASN/S1
DATIN					17	4	2		2
HSDMAOK	2		1		2	2			3
KITI	2		1		5			1	1
PAPHLN	2	1	1		3	1		2	2
PKM	1				7	6			
PTSA				1	4	1			1
SPASI					12	7			1

1.3.4 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusdatin mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Unit Kerja Pusdatin terdiri atas Pranata Komputer, Statistisi, Analis Kebijakan, Surveyor Pemetaan, Perencana, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Arsiparis, dan Penata Perizinan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Pusdatin Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin

Jenjang Jabatan Fungsional Lingkup Pusdatin	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)					Total
	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Terampil	
Analis Kebijakan			1			1
Analis Pengelola Keuangan APBN		1				1
Analis SDM			1			1
Arsiparis				1		1
Penata Perizinan	1	1	3			5
Perencana	1	1				2
Pranata Keuangan APBN					1	1
Pranata Komputer	7	1	22	1	2	43
Statistisi	6	3	9			18
Surveyor Pemetaan	2		2		1	5
Total	17	17	38	2	4	78

Catatan : Termasuk Pejabat Transformasi dan PPPK

1.4 Potensi

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu

perlu dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi, untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi antara lain:

1. Sumber Daya Manusia dengan jumlah 100 orang, sebagai Pranata Komputer 43 orang, Statistisi 18 Orang, 5 orang Surveyor Pemetaan, sisanya terdapat Jabatan Fungsional pendukung dan pelaksana.
2. BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data dan Informasi, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dengan menekankan pada aspek strategis berupa pengelolaan data dan informasi sumber daya kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan melalui kegiatan akuisisi, pengolahan dan diseminasi data dalam bentuk data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Pada BPISDKP mempunyai citra satelit bumi yang berfungsi untuk memantau kondisi terkini dari kapal penangkap ikan dan kapal pengawas.
3. Ruang *Command Center* KKP, yang berfungsi menyajikan data secara *real time* dalam bentuk *dashboard* pemantauan.
4. Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), yang bertugas sebagai unit pengelola perizinan perikanan dan kelautan terpadu lingkup KKP.
5. Portal Satu Data KP, yang berfungsi menyajikan data statistik kelautan dan perikanan secara *real time* dalam bentuk *dashboard*.
6. Portal *Collaboration Office*, yang mempunyai fungsi sebagai portal korespondensi persuratan, dan administrasi pegawai.
7. Portal Bantuan Pemerintah, yang berfungsi menyajikan data bantuan KKP kepada pelaku usaha perikanan dan kelautan.

1.5 Permasalahan dan Tantangan

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang terbatas pada bidang analisa data, analisa hukum, perancang undang-undang, dan analisa kerja sama;
2. Bagi Pakai Data antar K/L memerlukan PKS;

3. Renovasi/Pembaharuan sarana dan prasarana pada ruang layanan PTSA yang tertunda serta perlunya penambahan alokasi petugas khusus untuk *customer service* PTSA KKP;
4. Proses pengajuan *clearance* TIK KKP harus menginput proses bisnis *as-is* dan *to-be*. Kondisi saat ini proses bisnis *as-is* sudah terisi sedangkan proses bisnis *to-be* KKP belum ditetapkan. Hal tersebut membuat proses input *clearance* TIK tidak dapat dilanjutkan;
5. Banyaknya aplikasi yang menghasilkan database sendiri-sendiri, sehingga mengakibatkan sulitnya untuk menjadikan satu informasi yang lengkap dan komprehensif;
6. Belum tersedianya tim operasional Pengelola Keamanan Maritim dengan berbagai ragam jabatan fungsional lingkup eselon I KKP pada *command center* KKP;
7. Keterbatasan anggaran operasional Pengelola Keamanan Maritim selama 24 jam per 7 hari;
8. Belum adanya *dashboard* keamanan siber untuk melakukan monitoring terpusat terhadap keamanan sistem elektronik dan infrastruktur KKP dan melakukan mitigasi serangan siber;
9. Belum adanya kebijakan yang mengatur untuk pelaporan Pegawai mutasi/pensiun/pengunduran diri dan Pihak Ketiga/Vendor yang melakukan pengembangan aplikasi telah melakukan penyelesaian pekerjaan/mencapai akhir masa kontrak untuk menjadi acuan melakukan *review* hak akses VPN dan *server*;
10. Pengembangan aplikasi yang selama ini berjalan di lingkup KKP masih terfokus pada fungsional aplikasi semata, dan belum mengindahkan berbagai kaidah keamanan yang seharusnya diberlakukan, serangan siber tidak semata ditentukan dari adanya kerentanan pada sisi aplikasi. Tingkat keberhasilan serangan siber paling tinggi justru hadir dari kerentanan yang terjadi di sisi pengguna aplikasi;
11. Belum seluruh pegawai memiliki kesempatan untuk mengikuti program peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang sesuai dengan ketentuan

dalam pemenuhan nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) serta manajemen talenta pengembangan SDM aparatur.

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan..Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2025 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja Pusdatin berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2025 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tujuan, organisasi, tugas pokok dan fungsi, potensi, permasalahan dan tantangan, serta sistematika penyusunan laporan kinerja.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar penjanjian kinerja Pusdatin yang telah dicapai dalam satu tahun, tindak lanjut rekomendasi triwulan sebelumnya, keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusdatin.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

a. Capaian Kinerja Organisasi

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan periode yang sama tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya (dapat dilihat di SPAN/PMK 249);
- Analisa program/kinerja yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusdatin sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja.

4. **Bab IV Prestasi dan Kinerja Lainnya**, menjelaskan capaian prestasi dan capaian kinerja lainnya yang diperoleh pada periode triwulan I tahun 2025 pada unit kerja Eselon II.
5. **Bab V Penutup**, menjelaskan kesimpulan dan rencana tindak lanjut pada periode selanjutnya.



BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kerja Sekretaris Jenderal 2025-2029

Rencana Kerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Setjen tahun 2025 yang terdiri atas: a. arah kebijakan, sasaran strategis, program (sasaran program dan indikator sasaran program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta dukungan terhadap prioritas nasional sebagaimana tercantum; b. matriks Renja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; c. rincian prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025; dan d. rincian pagu alokasi anggaran per program dan per unit organisasi Tahun 2025.

Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada tahun 2025-2029 Sekretariat Jenderal menetapkan visi, yaitu Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan. Sekretariat Jenderal menjadi motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan reformasi birokrasi dan dukungan manajemen di

lingkungan KKP. Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, maka misi yang ditetapkan adalah: 1. Memberikan pengawasan intern terbaik untuk peningkatan kinerja KKP; 2. Mendorong pengendalian intern yang efektif terhadap sistem dan tata kelola KKP; dan 3. Mendorong terwujudnya sumber daya manusia aparatur KKP yang berintegritas dan berorientasi pelayanan prima.

Dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Jenderal, disusun tujuan sebagai berikut: 1. Terwujudnya kinerja KKP yang efektif dan efisien; 2. Terciptanya suatu sistem dan tata kelola KKP yang baik; dan 3. Terwujudnya budaya integritas di lingkungan KKP.

2.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah salah satu bagian dari perjanjian kinerja yang merupakan salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kegiatan dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Untuk mencapai tujuan organisasi, maka ditetapkan beberapa sasaran dan indikator kinerja lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025, antara lain:

1. Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP dengan indikator kinerja, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi KKP, Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP, Nilai Keterbukaan Informasi Publik, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP, Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP, Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan

Keuangan KKP, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal, serta Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal.

2. Sasaran PNBP BLU Sektor KP Meningkat dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP, dan Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP.

Adapun tujuan Pusdatin adalah sebagai berikut :

1. mewujudkan penyajian data, statistik dan pelayanan informasi secara berkesinambungan;
2. mewujudkan sarana jaringan Sistem Informasi Manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pelayanan alur data maupun informasi secara mutakhir, tepat, cepat dan efisien;
3. mewujudkan Sistem Pemerintahan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi lingkup kementerian;
4. terciptanya SDM yang handal dalam sistem dan teknologi informasi serta pengolahan, penyajian dan analisa data statistik; dan
5. terwujudnya data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir guna mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka pada Triwulan I Tahun 2025 Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

2.3. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Pada tahun 2025 Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang diuraikan ke dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama. Penetapan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon I bagi Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II serta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Perjanjian Kinerja pejabat Eselon I. Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2025
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91
		2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	77
		4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,2
		5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77
		6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	90
		7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	100
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	64,68

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2025
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,7
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)	100
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100
		18.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	87
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	85
		20.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95

2.4. Program dan Kegiatan

Pusdatin merupakan unit Eselon II yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP, melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan, yaitu “Program Dukungan Manajemen”. Sejak Tahun Anggaran 2023, telah diimplementasikan kebijakan 1 (satu) DIPA pada masing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP, sedangkan DIPA Sekretariat Jenderal KKP dikelola di Biro Umum. Pusdatin yang merupakan unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal melaksanakan 4 (empat) kegiatan dalam Rincian *Output* (RO), yang akan memenuhi sasaran kegiatan. RO tersebut, antara lain:

1. Pengelolaan Data dan Informasi
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal
3. Sistem Informasi Pemerintahan
4. Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi

Untuk mencapai sasaran tersebut dengan sejumlah target indikator sebagaimana tabel di atas, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2025 senilai Rp 96,149,421,000,- (pagu sebelum efisiensi), setelah efisiensi anggaran Pusdatin senilai Rp 27.107.719.000 (pagu efektif) atau 71,81% yang telah diefisiensi. Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut di atas dijabarkan kepada target kinerja tahunan dan triwulanan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Pusdatin Triwulanan dan Tahunan.

2.5 Tindak Lanjut Rekomendasi

Sub bab ini menginformasikan tindak lanjut dari rekomendasi pada triwulan sebelumnya, antara lain:

1. Estimasi capaian produksi perikanan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 5.865.913 ton terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 1.699.828 ton dan perikanan budi daya sebesar 4.166.085 ton. Produksi perikanan triwulan I tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,21 persen dibandingkan triwulan I tahun 2024 (y on y) dan melambat sebesar 7,06 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 (q to q). Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 (y on y) dan mengalami pelambatan sebesar 16,41 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 (q to q). Sedangkan untuk produksi perikanan budi daya mengalami peningkatan sebesar sebesar 2,61 persen dibandingkan triwulan I tahun 2024 (y on y) dan perlambatan pertumbuhan sebesar 2,62 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 (q to q);
2. Capaian PDB Perikanan Triwulan IV-2024 atas harga konstan (ADHK) adalah sebesar Rp. 77,1 triliun dan atas harga berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp. 147,1 triliun. Secara *y-on-y* capaian PDB Perikanan Triwulan IV-

2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,95 persen dibandingkan PDB Perikanan Triwulan IV-2023 dengan kontribusi PDB Perikanan Triwulan IV-2024 sebesar 2,59 persen artinya kontribusi PDB sektor perikanan Indonesia Triwulan IV-2024 menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang mencerminkan kenaikan income para pelaku subsektor kelautan dan perikanan secara rata-rata pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023

3. Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) Triwulan IV-2024 sebesar 102,03 atau mengalami kenaikan sebesar 0,04 persen dibandingkan triwulan III-2024 (*q-to-q*) dan capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Triwulan IV-2024 sebesar 102,93 atau mengalami kenaikan sebesar 1,37 persen dibandingkan triwulan III-2024 (*q-to-q*). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh baik dari nelayan maupun pembudidaya ikan dari menjual hasil tangkapan dan kegiatan membudi daya ikan lebih besar daripada biaya operasional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, hasil evaluasi Indeks SPBE KKP Tahun 2024 adalah 3,99 (kriteria "Sangat Baik"). Terdapat peningkatan nilai Indeks SPBE KKP dari 3,58 di tahun 2023;
5. Menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait digitalisasi di lingkungan KKP, saat ini portal KKP telah dilengkapi dengan fitur tanda tangan elektronik pada menu produk hukum, surat keputusan kepegawaian, dan pada menu perizinan. Saat ini juga sedang dibangun portal pegawai, sebagai pengembangan Aplikasi ePegawai KKP;
6. Meningkatkan penguatan keamanan siber di lingkup KKP secara menyeluruh, penguatan tidak bisa hanya difokuskan pada menambal kerentanan di sisi aplikasi saja. Masing-masing individu sebagai pengguna infrastruktur jaringan dan teknologi informatika harus mempraktekan penggunaan internet secara bertanggungjawab dengan melakukan berbagai upaya seperti melakukan penggantian kata sandi secara berkala,

menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, serta menghindari penggunaan kembali kata sandi lama. Selain itu, pengguna juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam membuka tautan atau lampiran yang diterima melalui email atau pesan instan, mengingat metode *phishing* semakin canggih dan sulit dibedakan dari komunikasi resmi;

7. Disamping itu, kesadaran akan pentingnya memperbarui perangkat lunak secara rutin juga harus ditingkatkan. Pembaruan perangkat lunak, termasuk sistem operasi dan aplikasi, sering kali mencakup perbaikan terhadap celah keamanan yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan memastikan bahwa perangkat dan aplikasi selalu dalam versi terbaru, risiko serangan dapat diminimalkan secara signifikan;
8. Meningkatkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara tim keamanan siber dan seluruh pengguna teknologi informasi di lingkup KKP menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman dan tangguh. Dengan pemahaman dan komitmen bersama, kita dapat memperkuat ketahanan siber di lingkungan kerja kita dan mengurangi potensi ancaman yang dapat merugikan operasional serta keamanan data institusi kita. Bersama-sama menjadikan keamanan siber sebagai prioritas bersama demi kelangsungan dan keberlanjutan teknologi informasi yang andal dan terpercaya;
9. Melengkapi data *warehouse*, akses ke server basis data KKP dan API KKP;
10. Akan dilaksanakan implementasi operasional digitalisasi perizinan yang meliputi modul Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), Buku Kapal Perikanan (BKP), Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SKAT SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), serta akan dilaksanakan uji lapangan digitalisasi perizinan melibatkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, PSDKP, Pusdatin, yang akan dilaksanakan di pelabuhan terdekat;
11. Meningkatkan manajemen Sumber Daya Manusia atas dasar Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sistem Negara (ASN) dengan mendorong kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, diklat, dan seminar-seminar yang

relevan; memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sebagai bentuk motivasi untuk terus meningkatkan kinerja; dan melakukan pemutakhiran data terkait riwayat pendidikan, pelatihan, seminar, dan workshop yang pernah diikuti oleh pegawai melalui aplikasi myASN secara berkala;

12. Melakukan pemantauan terhadap indikator kinerja setiap triwulan, agar realisasi dan capaian dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta untuk meningkatkan NKO Pusdatin di tahun yang akan datang;
13. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan agar dapat terlaksana sesuai dengan *output* dengan melakukan Dialog Kinerja setiap seminggu sekali melalui apel pagi dimana masing-masing Ketua Tim Kerja lingkup Pusdatin memberikan perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

2.6. Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024

Penetapan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan informasi pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya. Berikut merupakan rincian pemanfaatan informasi Laporan Kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi Tahun 2024 dalam penetapan awal kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi Tahun 2025.

Tabel 7. Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi Tahun 2024 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan Target Pusat Data, Statistik dan Informasi Tahun 2025

No.	Perjanjian Kinerja 2024			Perjanjian Kinerja 2025			Keterangan
	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	91	96,42	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	91	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024

2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen	94	125	-	-	-	IKU ini belum dapat dicantumkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan capaian telah mencapai maksimal dan belum dirancangnya formula capaian terbaru
3.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	3,5	4,11	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	3,5	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
4.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	76	98,95	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	77	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3,05	3,99	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3,2	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
6.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	76	80,78	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	77	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
7.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	90	100	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	90	-	IKU ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)
8.				Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	100	-	IKU ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)
9.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	2,5	3,40	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	3	-	Target IKU ini diturunkan dikarenakan penilaian tahun 2025 oleh BSSN, dimana aspek penilaiannya tidak tetap dan bertambah setiap tahun
10.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	70	89,17	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	64,68	-	Target IKU ini diturunkan berdasarkan capaian pada tahun 2024 yang tidak mencapai target
11.	Tingkat Implementasi Kebijakan	3	3	Tingkat Implementasi Kebijakan	3	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024

	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP			Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP			
12.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	2,75	2,73	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	2,7	-	Target IKU ini diturunkan berdasarkan capaian pada tahun 2024 yang tidak mencapai target
13.	Indeks Pelayanan Publik KKP	4,59	4,80	Indeks Pelayanan Publik KKP	4,6	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
14.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	85	90,15	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	88,87	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
15.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	88,30	91,47	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	89,6	91,80	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2024
16.	Nilai PM SAKIP Pusdatin	84	84,55	Nilai PM SAKIP Pusdatin	87	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatory Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
17.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	100	100	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	100	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatory Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
18.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	100	100	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	100	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatory Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
19.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin	85	90,13	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin	87	100	Merupakan Indikator dan Target Mandatory Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
20.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	95	100	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	85	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatory Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
21.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan	94	133,33	-	-	-	IKU ini belum dapat dicantumkan pada Perjanjian Kinerja

	Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin						Tahun 2025 dikarenakan capaian telah mencapai maksimal dan belum dirancangnya formula capaian terbaru
22.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin	95	99,49	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin	95	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatory Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal

2.6. Keselarasan Rancangan Renstra KKP 2025-2029, Rencana Kerja 2025, dan Perjanjian Kinerja 2025

Akuntabilitas Kinerja organisasi Sekretariat Jenderal merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Setjen Triwulan I Tahun 2025 diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Level 1 Setjen sebesar 117,39 capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 105,86.

Hasil verifikasi capaian Indikator Kinerja Unit Organisasi level II Triwulan I Tahun 2025 lingkup Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil verifikasi capaian Indikator Kinerja Unit Organisasi level II Triwulan I Tahun 2025 lingkup Sekretariat Jenderal

No	Unit Kerja	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator yang diukur di TW I 2025	NKO sebelum Verifikasi	NKO sesudah Verifikasi
1.	Setjen	10	3	117,39	117,39
2.	Biro Perencanaan	18	1	117,65	117,65
3.	Biro SDMAO	19	1	117,65	117,65
4.	Biro Hukum	15	2	118,83	118,83
5.	Biro Humas dan KLN	14	5	108,83	108,83
6.	Biro Keuangan dan BMN	17	2	116,22	116,22
7.	Biro Umum dan PBJ	16	2	112,94	112,94
8.	Pusdatin	20	2	111,59	111,59
9.	LPMUKP	11	3	118,83	118,83
10	BPI SDKP	9	1	117,65	117,65

Pada Rencana Strategis KKP 2025-2029, Pusat Data dan Informasi, berkontribusi pada sasaran strategis dan indikator kinerja, yaitu:

Tabel 9. Indikator Kinerja Pusdatin Tahun 2025 pada Rencana Strategis KKP 2025-2029

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91
		2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	77
		4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,2
		5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77
		6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	90
		7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	100
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	64,68
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,7
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)	100
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100
		18.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	87
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	85
		20.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 menjadi acuan penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pusdatin, dan rencana kerja Pusdatin yang tertuang pada kegiatan-kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Keselarasan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Rancangan Renstra KKP 2025-2029	Renja Setjen 2025	PK Pusdatin 2025
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91	91	91
		2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5	3,5	3,5
		3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	77	77	77
		4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,85	3,85	3,2

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Rancangan Renstra KKP 2025-2029	Renja Setjen 2025	PK Pusdatin 2025		
		5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77	76	77		
		6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	90	90	90		
		7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	100	100	100		
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3	3	3		
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70	70	64,68		
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3	3	3		
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75	2,75	2,7		
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6	4,6	4,6		
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87	88,87	88,87		
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6	89,6	89,6		
		15.	Persentase Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94	94	-		
		2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87	87	87
				16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)	100	100	100
				17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100	100	100
				18.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	87	87	87
19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)			85	85	85		
20.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)			95	>95	95		

Pada Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2025 terdapat ketidaksamaan target pada IKU “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP” dan IKU “Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP” pada Renstra Setjen 2025-2029 dan Rencana Kerja Setjen 2025 dikarenakan menyesuaikan capaian tahun 2024 atas rekomendasi tim kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aplikasi Sistem Informasi (SPBEASI) dan Pengelolaan Data dan Statistik Pusdatin. Target IKU “Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan” diturunkan berdasarkan capaian pada tahun 2024 yang tidak mencapai target dan IKU “Persentase Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” dihapus dan belum dapat dicantumkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan capaian telah mencapai maksimal dan belum dirancangnya formula capaian terbaru.

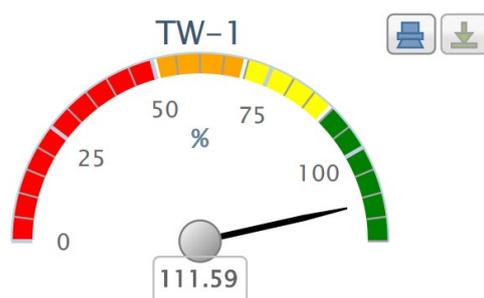
BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

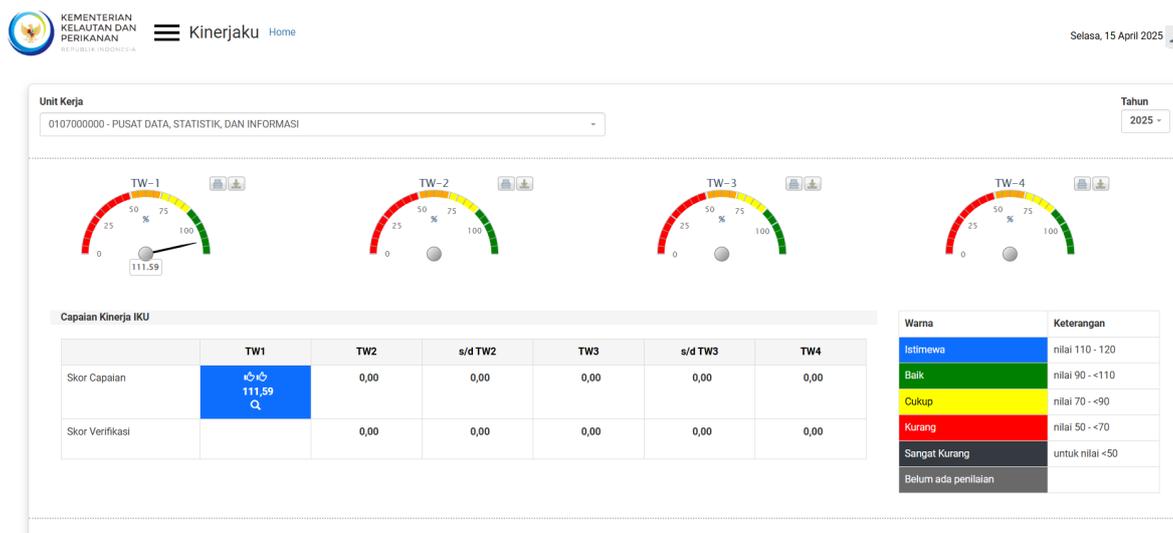
3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP, yang diturunkan melalui visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP.

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pusat Data dan Informasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Tim Kerja di Pusat Data dan Informasi dengan didasarkan atas perjanjian kinerja yang telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Pusat Data dan Informasi menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Adapun Nilai Kinerja Pusdatin periode Triwulan I Tahun 2025 pada aplikasi kinerjaku dengan nilai **111.59%** dengan predikat **Istimewa**, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2025



Gambar 8. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Pusdatin dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 11. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian (%)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91	-	-
		2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5	-	-
		3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	77	-	-
		4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,2	-	-
		5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77	-	-
		6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	90	-	-

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian (%)
		7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	100	-	-
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3	-	-
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	64,68	-	-
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai)	3	-	-
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,7	-	-
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6	-	-
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87	-	-
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6	91,80	105,52
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87	-	-
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	100	-	-
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100	-	-
		18.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	87	-	-
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	85	100	117,65
		20.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95	-	-

1.2 Capaian Kinerja Anggaran

Dalam melaksanakan capaian kinerja, perlu dukungan anggaran, berikut disampaikan, capaian kinerja anggaran Pusdatin tahun anggaran 2025, yang dituangkan dalam rencana aksi, sebelum efisiensi.

Tabel 12. Rencana Aksi Pusdatin Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Kegiatan	Output/Komponen Pendukung Dalam RKAKL	Anggaran/ Pagu (Rp 000)	Realisasi
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91	Pengelolaan Data Geospasial (Satu Peta)	Data Geospasial	232.016.000*	1.653.000
			Percepatan Pendataan Kusuka	Data update KUSUKA	1.057.383.000*	35.087.455
			Validasi Nasional	Data produksi perikanan dan kelautan	603.548.000*	2.400.000
	2. Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5	Sinkronisasi dan Koordinasi Layanan Aplikasi Sistem Informasi	Pengelolaan aplikasi lingkup KKP	487.609.000*	-
3. Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	77	Penerapan Digitalisasi dan Monitoring Pelabuhan Perikanan Terintegrasi dengan Command Center	Implementasi operasional digitalisasi perizinan yang meliputi modul SIUP, SIPI, SIKPI, SKKP, BKP, SKAT SLO dan SPB.	2.913.076.000*	-	
4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,20	Koordinasi Penyelenggaraan SPBE dengan K/L terkait	nilai hasil evaluasi Indeks SPBE KKP dan draft Kepmen tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	186,642,000*	7.310.000	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Kegiatan	Output/Komponen Pendukung Dalam RKAKL	Anggaran/ Pagu (Rp 000)	Realisasi
	5. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77	Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP	Berita Acara Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP	Tidak tercantum pada RKAKL	-
	6. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	90	Layanan Geospasial	Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9.666.497.000 *BPISDKP	-
	7. Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	100	Pemenuhan Informasi Geospasial	Informasi geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	500.000.000 *BPISDKP	-
	8. Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3	Pelaksanaan Keamanan Siber dan Infrastruktur TI	Indeks Tingkat Keamanan Siber dan Infrastruktur TI	1.905.980,000	19.924.500
	9. Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (persen)	64,68	Penyusunan Data Statistik Nasional	Persentase Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	183,556,000 *	5.994.000
	10. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3	Penyusunan Grand Desain Arsitektur dan Peta	Penyusunan draft Kepmen tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, draft Kepmen tentang Arsitektur dan peta	677.418.000*	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Kegiatan	Output/Komponen Pendukung Dalam RKAKL	Anggaran/ Pagu (Rp 000)	Realisasi	
	11. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,7	Penyusunan Dokumen Evaluasi Data dan Statistik	Nilai Statistik Sektor KKP	246.352.000*	7.487.600	
	12. Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,60	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap	Indeks Pelayanan publik KKP	519,613,000*	476.000	
	13. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87	Penyusunan Standar Layanan Perizinan Terpadu	Nilai tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP	108,687,000*	3.432.000	
	14. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	87	Monev Layanan Perizinan Terpadu	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	517,764,000*	54.958.780	
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87	Penyusunan dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi	Rencana Kerja, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, Laporan Tahunan	164,802,000*	-
	16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)	100	Penyempurnaan Peraturan dan Perjanjian Kerjasama Data, Statistik dan Informasi	Permen dan Kepmen KP bidang data dan informasi, Perjanjian Kerja Sama dengan instansi terkait tentang berbagi pakai data	323,674,000*	11.707.300	
	17. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100	Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/ Penatausahaan Keuangan / Penatausahaan BMN	Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK	278.302.000	78.733.412	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Kegiatan	Output/Komponen Pendukung Dalam RKAKL	Anggaran/ Pagu (Rp 000)	Realisasi
	18. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pusdatin (indeks)	87	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM (Sertifikasi) Bidang Data dan Informasi	Indeks IP ASN	2.500.000	2.500.000
	19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	85	Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/ Penatausahaan Keuangan / Penatausahaan BMN	Tindak lanjut rekomendasi sebagai acuan perbaikan kinerja selanjutnya	278.302.000	78.733.412
	20. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95	Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/ Penatausahaan Keuangan / Penatausahaan BMN	Laporan Keuangan	278.302.000	78.733.412

*)Blokir Efisiensi

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Realisasi dan capaian kinerja Pusdatin Tahun 2025 berdasarkan PK yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

3.3.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan

Definisi Indikator Kinerja

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Eselon II lingkup KKP (Setditjen) terkait yang menangani data produksi perikanan. Terdapat 3 (tiga) variabel perhitungan yang digunakan untuk evaluasi TKPD, yaitu :

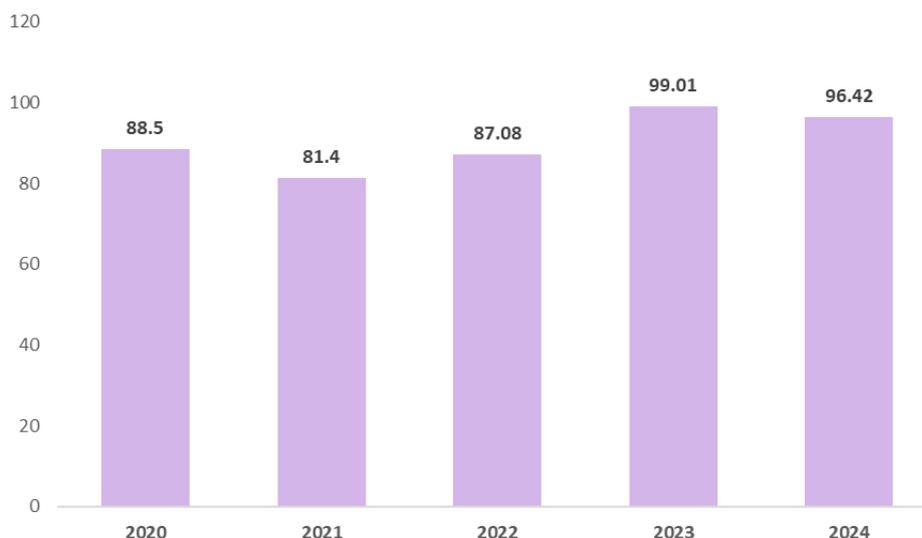
1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (Variabel X₁), Bobot Nilai 30%. Dihitung berdasarkan jumlah KUSUKA yang telah valid pada setiap Unit Kerja Eselon I pada laman Satu Data KKP.
2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (Variabel X₂), Bobot Nilai 40%
Merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap sampling yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas Validasi Nasional pada aplikasi validasi nasional *desktop* dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (Variabel X₃), Bobot Nilai 30%
Merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh Unit Data Eselon I. Hasil pengukuran hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Analisa Capaian

Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode tahunan, sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan											
Nama IKU	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra KKP 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-TW I 2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
88,50	81,40	87,08	99,01	96,42	-	-	-	-	91	-	95	-



Gambar 9. Grafik Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP (%) Tahun 2020-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Meskipun belum terdapat capaian pada triwulan I tahun 2025 ini, namun untuk mendukung IKU TKPD Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Melakukan Validasi Nasional Semester I Tahun 2024 dengan Eselon I dan Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi Capaian Pendataan Kusuka oleh Penyuluh Perikanan;
3. Melakukan koordinasi dan pembahasan capaian produksi perikanan triwulan I tahun 2025 dan justifikasi terhadap peningkatan dan penurunan produksi, dengan hasil:
 - a. Estimasi produksi perikanan tangkap menggunakan pendekatan pertumbuhan rata-rata (*Moving Average*) dengan mempertimbangkan laporan produksi dari pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Daerah. Sedangkan produksi perikanan budidaya menggunakan metode *Single Exponential Smoothing* (SES).
 - b. Estimasi capaian produksi perikanan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 5.865.913 ton terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 1.699.828 ton dan perikanan budi daya sebesar 4.166.085 ton.

Produksi perikanan triwulan I tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,21 persen dibandingkan triwulan I tahun 2024 (y on y) dan melambat sebesar 7,06 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 (q to q). Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 (y on y) dan mengalami pelambatan sebesar 16,41 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 (q to q). Sedangkan untuk produksi perikanan budi daya mengalami peningkatan sebesar 2,61 persen dibandingkan triwulan I tahun 2024 (y on y) dan perlambatan pertumbuhan sebesar 2,62 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 (q to q).

- c. Peningkatan produksi perikanan budidaya pada triwulan I tahun 2025 dipengaruhi oleh:
 - a. Kontribusi peningkatan produksi perikanan budi daya berasal dari komoditas ikan seperti ikan Lele, Nila, Patin, Bandeng dan Udang. Peningkatan Ikan Nila sebagai dampak telah operasionalnya modelling ikan Nila di Kabupaten Karawang dan meningkatnya produksi di sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara;
 - b. Peningkatan produksi udang karena telah operasionalnya Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kabupaten Kebumen dan di beberapa wilayah yang produksinya cukup baik seperti di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat;
 - c. Dampak operasionalnya kampung perikanan budi daya modern air tawar tahun 2025 di beberapa lokasi di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
- d. Peningkatan produksi perikanan tangkap triwulan I tahun 2025 dipengaruhi oleh:
 - a. Laporan produksi yang didaratkan di pelabuhan perikanan UPT pusat dan beberapa UPT daerah pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan peningkatan produksi sebesar 1,87 persen dibandingkan dengan produksi pada triwulan I tahun 2024 (y on y) dan melambat 16,74 persen jika dibandingkan dengan produksi triwulan IV tahun 2024 (q to q). Peningkatan produksi yang cukup

signifikan di beberapa pelabuhan UPT Pusat antara lain PP Tual, Maluku; PP Karangantu, Banten; PP Kejawanan, Jawa Barat; PP Bitung, Sulawesi Utara, PP Pemangkat, Kalimantan Barat; PP Brondong, Jawa Timur; PP Bungus, Sumatera Barat dan PP Nizam Zachman, DKI Jakarta. Sedangkan Pelabuhan UPT Daerah yang mengalami peningkatan antara lain di PP Idi, Aceh; PP Kuala Tungkal, Jambi; PP Morodemak dan PP Wonokerto, Jawa Tengah; PP Pulau Baai, Bengkulu, PP Kotabaru, Kalimantan Selatan; PP Merauke, Papua; PP Lekok, Jawa Timur; PP Blanakan, Jawa Barat dan PP Dulanpokpok, Papua. b. Beberapa komoditas yang mengalami peningkatan seperti ikan Tuna meningkat sebesar 15,22 persen (y on y); ikan Cakalang meningkat 14,08 persen (y on y) dan meningkat 7,39 persen (q to q); dan Cumi-cumi meningkat sebesar 6,58 persen (y on y).

4. Telah diselesaikan oleh pihak ke-3 seluruh kegiatan pembangunan platform portal dan big data engine digitalisasi perizinan terdiri dari 12 modul, terdiri dari: Kusuka, Produksi, Validasi Nasional, Pengawasan, Bantuan Pemerintah, Satu Peta, Media Analitik, Kinerja, Big Data, Perizinan, User Management, Pendanaan Inovatif. Platform tersebut dapat diakses pada <https://portaldata.kkp.go.id>;
5. Platform <https://portaldata.kkp.go.id> tersebut menyajikan data publikasi statistik dan spasial dilengkapi standard data dan metadata yang dapat diakses publik.



Gambar 10. Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Pendataan Kusuka dan Penyuluh Perikanan TW 1-2025

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan Validasi Nasional Semester II tahun 2024 pada Bulan Mei 2025;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Validator Pusat dan Validator Daerah untuk segera memvalidasi data-data yang telah masuk;
3. Melakukan penilaian terhadap tingkat Kematangan Informasi Geospasial Tematik KKP yang terjamin kualitasnya lingkup Eselon I pada tahun 2025.

Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU TKPD dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi data dan statistik telah dialokasikan anggaran awal senilai Rp 246.352.000,- sedangkan setelah efisiensi senilai Rp. 8.748.000,- dengan realisasi realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 7.487.600,- atau mencapai 85,59%. Kegiatan yang mendukung yaitu rapat koordinasi dengan unit organisasi Eselon I dan II Lingkup KKP, validator pusat dan daerah; validasi nasional, rapat percepatan data KUSUKA, pengolahan data perikanan dan kelautan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja TKPD antara lain

media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, aplikasi portal satu data, internet, *drive* penyimpanan *file online* dan perangkat lunak *video conference*. Dengan adanya efisiensi anggaran Pusdatin tetap melaksanakan koordinasi intensif dengan unit organisasi, dan pihak terkait (BPS, Dinas KP, UPT terkait, dll) secara daring atau *zoom meeting*.

3.3.2 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Definisi Indikator Kinerja

Perhitungan indeks layanan aplikasi sistem informasi melalui Survei kepuasan layanan aplikasi, yaitu dengan memberikan masukan dari pengguna, sehingga Pusdatin dapat melakukan perbaikan yang relevan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Ini dapat membantu menjaga pengguna tetap terlibat dan setia terhadap aplikasi. Survei kepuasan juga dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana fitur dan fungsi tertentu berhasil atau tidak.

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian indeks ini maka penilaian diukur dengan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, 2 untuk jawaban tidak setuju, 3 untuk jawaban biasa saja/netral, 4 untuk jawaban setuju, dan 5 untuk jawaban sangat setuju. Metode yang digunakan dalam survei adalah metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner melalui aplikasi. Layanan yang menjadi objek survei adalah layanan aplikasi *Portal Collaboration Office*. Layanan ini merupakan layanan administrasi perkantoran/administrasi pegawai terintegrasi di KKP dengan objek survei yaitu pengguna layanan aplikasi *Portal Collaboration KKP*.

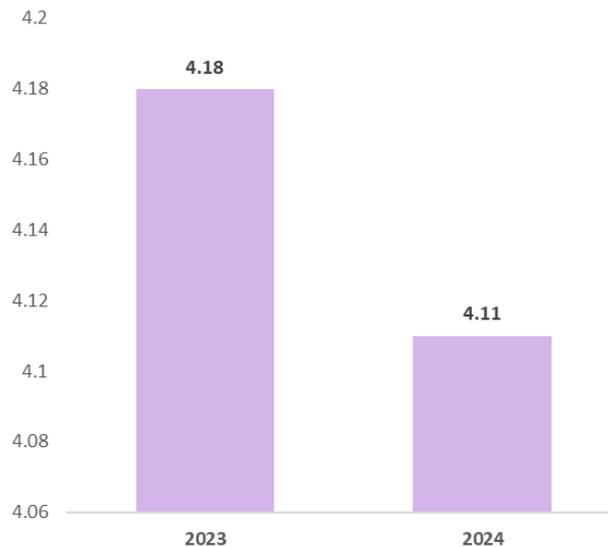
Analisa Capaian

IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan Indikator Kinerja yang dihitung dalam periode tahunan. sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan												
Nama IKU	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi												
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra KKP 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-TW I 2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029	
			4,18	4,11	-	-	-	-	3,5	-	3,9	-	

Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi dijadikan IKU mulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dikarenakan baru mulai selama 2 tahun, maka capaian berupa grafik terdapat pada grafik dibawah ini:



Gambar 11. Grafik Capaian IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks) Tahun 2020-2024

Capaian IKU ini pada periode tahun 2023-2024, mengalami penurunan dikarenakan terdapatnya perubahan variabel unsur pelayanan dalam penilaian indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi dimana pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) menjadi 5 (lima) variabel unsur pelayanan pada tahun 2024 dengan objek survei baru, yaitu layanan aplikasi Portal *Collaboration* KKP.

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Meskipun belum terdapat capaian pada triwulan I tahun 2025 ini, namun untuk mendukung IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Melaksanakan monitoring seluruh menu pada *Collaboration Office*;
2. Pengembangan aplikasi epegawai KKP;
3. Pengembangan aplikasi Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pengembangan menu tanda tangan elektronik pada portal KKP, yang terdiri dari TTDE layanan perizinan, kepegawaian, produk hukum, surat keputusan kepegawaian, dan pada menu perizinan;
5. Berkoordinasi dengan unit kerja eselon I yang sedang melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi.



Gambar 12. Rapat Harmonisasi Aplikasi Data dan Informasi Lingkup Ditjen PDSPKP

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melakukan monitoring serta pengembangan *Portal Colaboration Office* secara berkelanjutan sebagai sistem informasi yang terintegrasi di lingkungan KKP;

2. Menerapkan tanda tangan elektronik pada seluruh proses bisnis yang ada di KKP;
3. Sosialisasi aplikasi epegawai KKP;
4. Sosialisasi menu TTDE pada menu perizinan, peraturan perundang-undangan dan kepegawaian;
5. Menyiapkan kuesioner sebagai instrumen survei yang akan disampaikan kepada seluruh Unit Kerja Eselon I;
6. Melakukan survei layanan aplikasi di lingkungan KKP.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi melalui kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Layanan Aplikasi Sistem Informasi dengan anggaran awal senilai Rp 487.609.000,- sedangkan setelah efisiensi senilai Rp.0,- dikarenakan terdampak efisiensi anggaran.

3.3.3 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim

Definisi Indikator Kinerja

Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (PKM) merupakan penilaian atas kinerja dan implementasi layanan sistem informasi yang diberikan oleh Pusdatin kepada pimpinan KKP dan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP dalam menyajikan data secara *real time* dalam bentuk *dashboard* pemantauan di dalam ruang *command center*.

Dalam rangka mengevaluasi hasil kinerja Pusdatin sebagai penyedia layanan sistem informasi pada *command center* KKP, maka dibutuhkan survei kepada pengguna atau *user* di Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP maupun K/L yang telah memanfaatkan layanan sistem informasi. Selain itu juga dilakukan penilaian atas capaian rencana aksi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Pusat Kontrol Maritim selama 1 tahun.

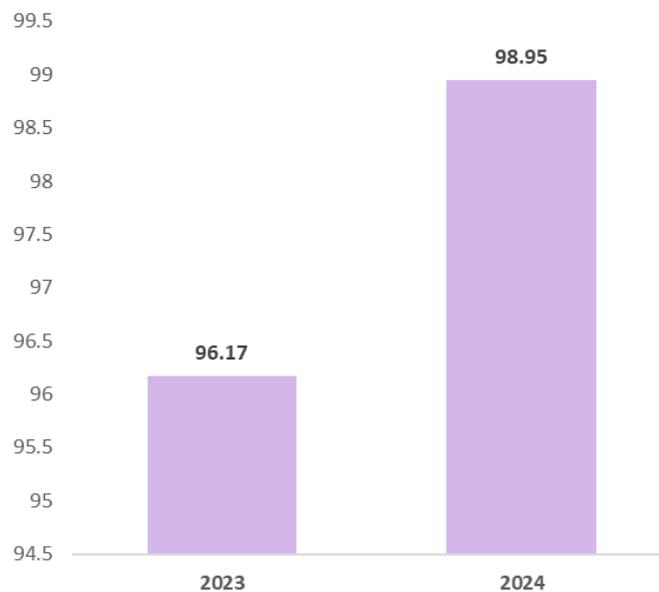
Analisa Capaian

IKU Persentase Layanan Sistem Informasi PKM merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung dalam periode tahunan, sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim												
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra KKP 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029	
-	-	-	96,17	98,95	-	-	-	-	77	-	81	-	

Persentase Layanan Sistem Informasi PKM, merupakan IKU yang baru dimulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dikarenakan baru mulai selama 2 tahun, maka capaian berupa grafik dapat disampaikan dibawah ini:



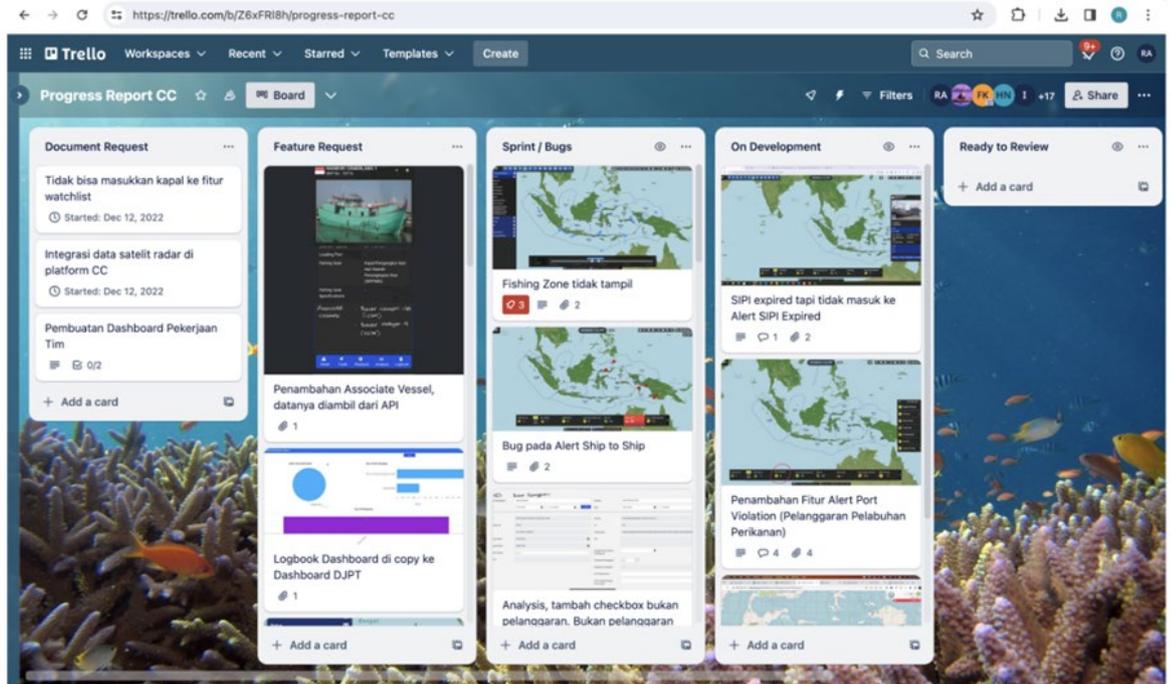
Gambar 13. Grafik Capaian IKU Persentase Layanan Sistem Informasi PKM Tahun 2023-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Meskipun belum terdapat capaian pada triwulan I tahun 2025 ini, namun untuk mendukung IKU Persentase Layanan Sistem Informasi Pengelolaan Keamanan Maritim, telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

No	Integrasi Data	Sumber Aplikasi	Eselon I	Contoh Data	Tampilan IMIP
9.	Data Vessel Monitoring System (VMS)	SPKP	DJPSDKP		
10.	Neraca Komoditas	SINAS-NK	DJPSDKP		

2. Kegiatan verifikasi data PKM dilakukan dalam rangka memastikan semua fitur pada aplikasi IMIP berfungsi dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi, PKM menggunakan platform Trello. Trello merupakan *platform project management* dan kolaborasi yang membantu mengorganisasi serta memprioritaskan proyek dalam bentuk visual. Menggunakan *sistem card, board*, dan list, Trello memberikan individu dan tim kemudahan untuk mengatur pekerjaan secara jelas, menciptakan struktur untuk melihat tugas, *deadline*, prioritas, serta perkembangan proyek secara real time. Trello memberi tahu apa siapa yang mengerjakan tugas tertentu, apa yang sedang dikerjakan, dan sejauh mana kemajuan tugas tersebut.
3. Pemanfaatan Trello dalam verifikasi data dilakukan secara kolaborasi antara pihak pengembang aplikasi dan tim verifikator dari PKM, mulai dari permintaan pengembangan fitur, penyampaian bugs dan status penanganannya hingga selesai dan berfungsi normal kembali. Berikut adalah tampilan Trello yang digunakan verifikasi data PKM yang terdiri dari 5 *board* yaitu *Document Request*, *Feature Request*, *Sprint/Bugs*, *On Development*, dan *Ready for Review*:



Gambar 14. Dashboard platform Trello

4. Kegiatan pengembangan data *warehouse* PKM dilakukan dalam rangka mengakomodasi fitur baru dan integrasi data yang diajukan oleh Eselon 1. Rincian usulan pengembangan yang diajukan pada tahun 2024 yang telah diakomodasi melalui pembuatan fitur baru dan integrasi data pada aplikasi IMIP PKM dapat dilihat pada link berikut <https://shorturl.at/JM4eB>.
5. Monitoring kinerja data *warehouse* dilakukan secara rutin melalui pembuatan laporan harian (*daily report*) untuk pengecekan fitur dan integrasi data secara menyeluruh. Status monitoring ditandai dengan warna hijau jika semua layanan berjalan dengan baik, sedangkan apabila terdapat kendala layanan tetapi *Integrated Maritime Intelligent Platform* (IMIP) masih berfungsi normal secara keseluruhan, maka status monitoring ditandai dengan warna kuning. Status monitoring ditandai dengan warna merah jika terdapat layanan API data yang tidak bisa diakses melalui aplikasi IMIP.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Data untuk operasional *Command Center*, akan dilaksanakan beberapa rapat koordinasi bersama *stakeholder* termasuk Eselon I pengampu aplikasi yang terlibat dalam data sebagaimana lingkup bisnis proses masing-masing Eselon I dan data transaksional perizinan;
2. implementasi operasional digitalisasi perizinan yang meliputi modul Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), Buku Kapal Perikanan (BKP), Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SKAT SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
3. akan dilaksanakan uji lapangan digitalisasi perizinan melibatkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, PSDKP, Pusdatin, yang akan dilaksanakan di pelabuhan terdekat.



Gambar 15. Rapat Pembahasan Integrasi Data dan Update Fitur Pengawasan Command Center

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim melalui kegiatan pengelolaan operasional PKM dengan anggaran awal senilai Rp. 1.148.262.000,- sedang setelah efisiensi senilai Rp.

15.870.000,- dengan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp. 15.556.338,- atau 98,02% Penerapan Digitalisasi dan Monitoring Pelabuhan Perikanan Terintegrasi dengan *Command Center* dengan anggaran senilai Rp 0,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 0,- atau 0% dikarenakan terdampak efisiensi anggaran.

3.3.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP

Definisi Indikator Kinerja

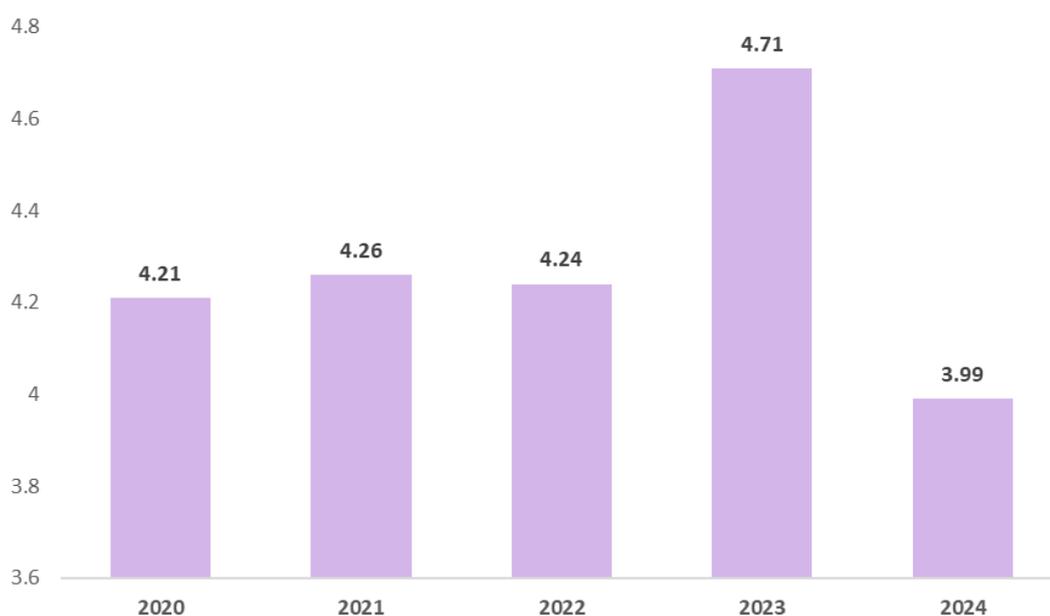
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diamanatkan kepada seluruh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi SPBE secara berkala. Evaluasi tersebut merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Analisa Capaian

IKU Indeks SPBE KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB), sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Indeks SPBE KKP												
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra KKP 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029	
4,21	4,26	4,24	4,71	3,99	-	-	-	-	3,2	-	4,85	-	



Gambar 16. Grafik Capaian IKU Indeks SPBE KKP Tahun 2020-2024

Capaian IKU ini pada periode tahun 2020-2024, mengalami penurunan dikarenakan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Penerapan Manajemen SPBE terlihat pada penerapan Penerapan Manajemen Risiko SPBE. Hal ini menyebabkan Layanan Publik yang diberikan tidak efektif dan optimal pemanfaatannya.

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)
Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Telah Terbitnya KEPMENKP No.22/SJ/2025 tentang Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan KKP tanggal 6 Maret 2025;
2. Asistensi *Clearance* belanja TIK SPBE KKP 2025 dengan Kementerian PAN RB;
3. Pembahasan Draft Keputusan Menteri KP tentang Kebijakan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) SPBE secara internal dan Biro Hukum.



Gambar 17. Asistensi *Clearance* Belanja TIK SPBE KKP dengan Kemen PAN RB



Gambar 18. Pembahasan Draft Keputusan Menteri KP tentang Kebijakan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) SPBE KKP

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Mengumpulkan data dukung untuk penilaian indeks SPBE tahun 2025;
2. Mengikuti sosialisasi penilaian SPBE 2025 oleh MenpanRB;
3. Menjaga komitmen dari seluruh anggota Tim Koordinasi SPBE, sehingga dapat meningkatkan tingkat kematangan implementasi SPBE 2025;
4. Pembahasan Draft Keputusan Menteri KP tentang Kebijakan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) SPBE.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan SPBE dengan K/L terkait dengan anggaran senilai Rp 7.310.000,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 7.310.000,- atau 100%.

3.3.5 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP

Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada dengan kriteria:

1. Memiliki Kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Dapat Ditransfer/Direplikasi
5. Berkelanjutan

Analisa Capaian

Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025 oleh Kementerian PANRB akan dilaksanakan kembali di Lingkungan

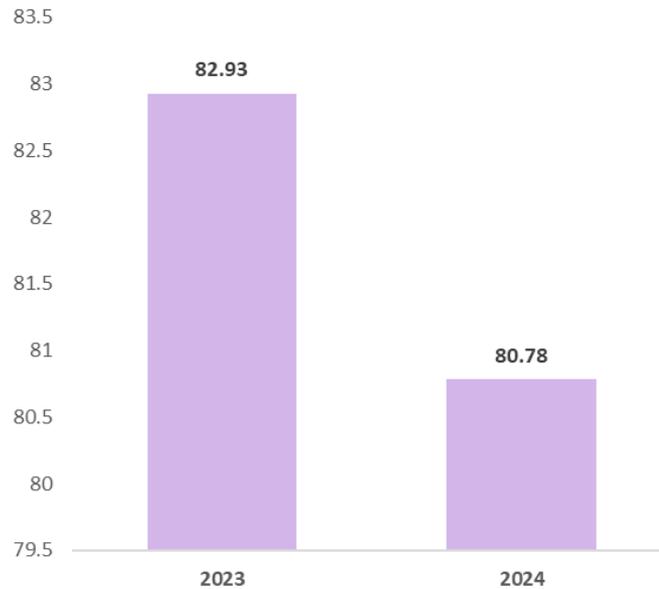
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD berdasarkan efisiensi anggaran. Penyampaian rencana penyelenggaraan inovasi pada tanggal 30 Januari 2025 dan publikasi yang disampaikan melalui kanal youtube Kementerian PANRB pada tanggal 21 Maret 2025, bahwa sosialisasi akan dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 April 2025 dan untuk petunjuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025 masih dalam tahap finalisasi oleh Kementerian PANRB. Agenda KIPP yang disampaikan pada sosialisasi tersebut akan menjadi referensi penyusunan *timeline* penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP.

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP												
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra KKP 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029	
-	-	-	82,93	80,78	-	-	-	-	77	-	81	-	

IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian internal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan. Target pelaksanaan kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP adalah pada Triwulan III tahun 2025.

Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP merupakan IKU yang baru dimulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dikarenakan baru mulai selama 2 tahun, maka capaian berupa grafik dapat disampaikan dibawah ini:



Gambar 19. Grafik Capaian IKU Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP Tahun 2023-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Penyampaian Nota Dinas Nomor 198/SJ.7/TU.210/I/2025, tanggal 15 Januari 2025 mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025;
2. Penyampaian Nota Dinas Nomor 1058/SJ.7/TU.210/III/2025, tanggal 27 Maret 2025 mengenai Permohonan Nama Pegawai sebagai Penilai pada Surat Keputusan Tim Penilai Internal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP Tahun 2025;



Gambar 20. Penyampaian Rencana Inovasi Pelayanan Publik oleh Kementerian PANRB

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Menyusun *timeline* kegiatan dan tim penilai proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP tahun 2025;
2. Menyelenggarakan Sosialisasi Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada unit Eselon I di lingkungan KKP.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP melalui kegiatan Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik internal KKP, namun anggaran dalam kegiatan ini tidak tercantum pada RKAKL tahun 2025.

3.3.6 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Definisi Indikator Kinerja

Proses akuisisi data citra satelit dikelola dan diolah menjadi data geospasial oleh BPISDKP, Perancak Bali, yang kemudian dimanfaatkan untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Proses pengelolaan data tersebut meliputi

pemesanan, proses akuisisi dan pengolahan data dari *raw data* hingga menjadi data geospasial level 2 (dua) yang menghasilkan informasi. Data yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan kelautan dan perikanan, termasuk untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan dengan cara menghitung pembagian antara data citra satelit yang digunakan untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan selama 2025 dan data citra satelit yang diakuisisi oleh BPISDKP selama 2025 dikalikan 100 persen. Target pada tahun 2025 adalah 100% dengan periode pengukuran tahunan.

Analisa Capaian

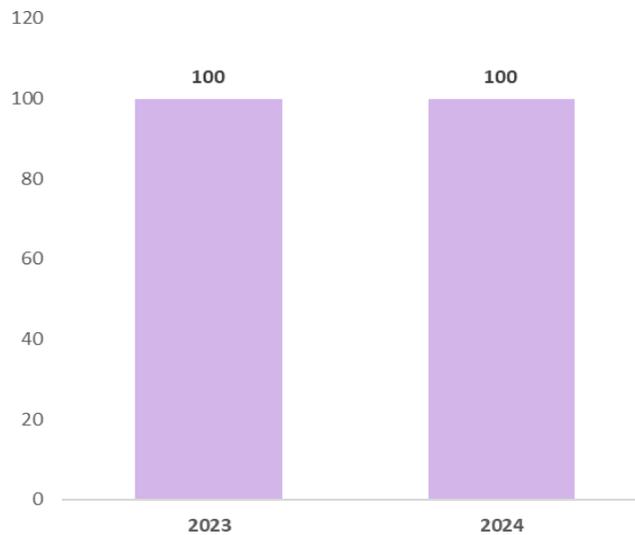
IKU ini merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode tahunan. sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra KKP 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	100	100	-	-	-	-	90	-	90	-

Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan IKU yang baru dimulai tahun 2023 sampai

dengan sekarang. Dikarenakan baru mulai selama 2 tahun, maka capaian berupa grafik dapat disampaikan dibawah ini:



Gambar 21. Grafik Capaian IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini yaitu perencanaan kegiatan oleh tim teknis dan koordinasi data dengan eselon I terkait. Untuk kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja terkendala pada proses tercapainya IKU karena anggaran masih terblokir Efisiensi berdasarkan Inpres 1 tahun 2025.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Layanan Data Kelautan dan Perikanan berupa pengadaan data citra satelit radar, Sarana Data Citra Satelit Radar dengan anggaran senilai Rp 9.666.497.000,- terkena efisiensi Rp. 8.963.400.000 dan pagu efektif Rp. 703.097.000 sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 0,- atau 0% (anggaran ini terdapat di DIPA Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan Perikanan).

3.3.7 Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi

Definisi Indikator Kinerja

Meliputi analisis data dan informasi, survey data dan diseminasi data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang dikelola oleh BPISDKP selama tahun 2025. Sesuai dengan tugas BPISDKP yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. BPISDKP juga memenuhi kebutuhan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan dari Direktorat Jenderal lingkup KKP dan *stakeholder* eksternal KKP. Mengingat tugas dan fungsi BPISDKP sebagai balai yang mengelola informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, analisis data, survey data dan diseminasi data dan informasi perlu dilakukan untuk menjamin kualitas dan keakuratan data.

Indikator kinerja tersebut diukur melalui perbandingan permintaan informasi geospasial yang dipenuhi selama 2025 dan permintaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan ke BPISDKP selama 2025. Target yang diharapkan pada tahun 2025 adalah 90% dari permintaan informasi geospasial yang dihasilkan BPISDKP. IKU ini memiliki periode pengukuran tahunan yang berarti capaian akan diukur pada akhir periode Triwulan IV.

Analisa Capaian

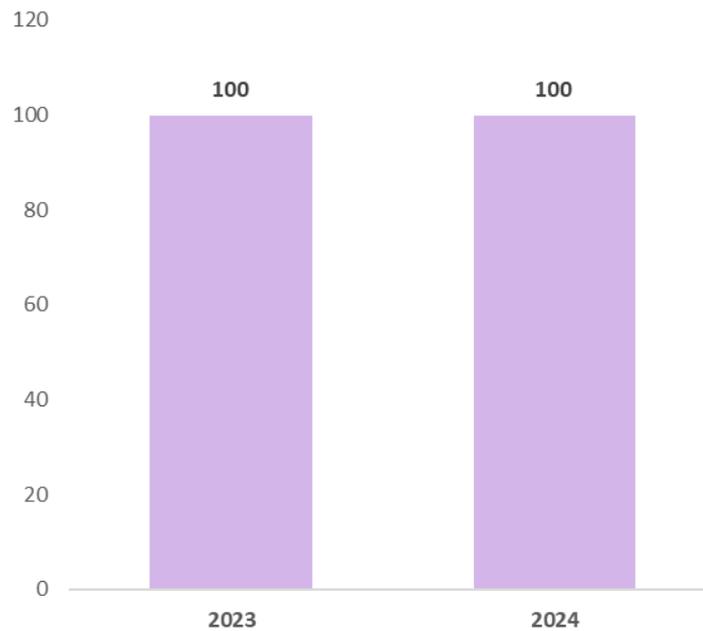
IKU ini merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode tahunan. sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029

-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	-	100	-
---	---	---	-----	-----	---	---	---	---	-----	---	-----	---

Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi merupakan IKU yang baru dimulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dikarenakan baru mulai selama 2 tahun, maka capaian berupa grafik dapat disampaikan dibawah ini:



Gambar 22. Grafik Capaian IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi Tahun 2023-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah perencanaan kegiatan oleh tim teknis. Untuk kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja terkendala pada proses tercapainya IKU karena anggaran masih terblokir Efisiensi berdasarkan Inpres 1 tahun 2025.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi melalui kegiatan OM Sarana Data Citra Satelit Radar dengan anggaran senilai Rp 500.000.000,- efisiensi total

sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 0,- atau 0% (anggaran ini terdapat di DIPA Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan Perikanan).

3.3.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP

Definisi Indikator Kinerja

Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan alat bantu untuk mengukur kematangan keamanan siber organisasi. Diharapkan organisasi dapat melakukan peningkatan pengelolaan keamanan siber serta memastikan pengelolaan tersebut berjalan optimal dan berfungsi secara menyeluruh.

Evaluasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber akan menghasilkan nilai indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) di instansi KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap kuesioner yang digunakan.

Kuesioner merupakan instrumen pengukuran maturitas penanganan siber dan sandi untuk memetakan tingkat kesiapan organisasi terhadap kemampuan penanganan dan menanggapi insiden keamanan siber.



Gambar 23. Aspek Pengukuran dan Tingkat Kematangan Keamanan Siber

Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dilakukan terhadap 5 aspek:

1. Tata Kelola;
2. Identifikasi;
3. Proteksi;

4. Deteksi; dan
5. Respon.

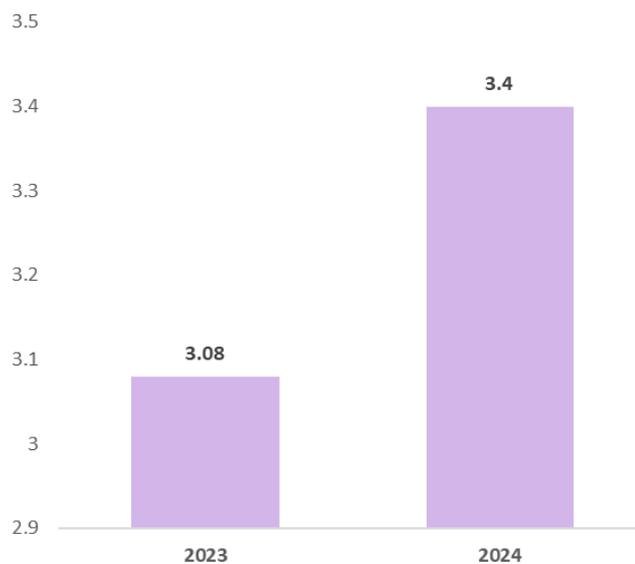
Analisa Capaian

IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	3,08	3,40	-	-	-	-	3	-	3,4	-

Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan IKU yang baru dimulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dikarenakan baru mulai selama 2 tahun, maka capaian berupa grafik dapat disampaikan dibawah ini:



Gambar 24. Grafik Capaian IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP Tahun 2023-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Tim Keamanan Siber dan Infrastruktur TI telah melakukan kegiatan Vulnerability Assessment selama Bulan Januari - Maret 2025 pada 12 (dua belas) Sistem Elektronik di KKP sebagai berikut:
 1. Aplikasi CDS (DJPT),
 2. Aplikasi Perizinan (DJPT),
 3. Aplikasi DAK (ROREN),
 4. Aplikasi E-LAUT (BPPSDM),
 5. Aplikasi PENTARU (BPPSDM),
 6. Aplikasi IMPIKAN (DJPB),
 7. Aplikasi SIBATIK (DJPB),
 8. Aplikasi SIAP (DJPKRL),
 9. Aplikasi SISALUT (DJPKRL),
 10. Aplikasi SIDA KO (DJPKRL),
 11. SIPCS, STELINA (DJPDSPKP)
2. Selama Bulan Januari - Maret 2025 telah terjadi beberapa insiden siber di KKP sebagai berikut:
 1. DDoS (*Distributed Denial of Service*) adalah jenis serangan siber yang bertujuan untuk membuat suatu layanan, server, atau sistem jaringan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri target dengan lalu lintas data dalam jumlah sangat besar secara bersamaan, sehingga sistem kewalahan dan berhenti merespons permintaan normal. Berbeda dengan DoS (*Denial of Service*) biasa yang hanya berasal dari satu sumber, DDoS melibatkan banyak perangkat yang telah dikompromi (sering disebut botnet), yang tersebar di berbagai lokasi.

Tabel 22. Serangan Siber DDoS (Distributed Denial of Service)

Nama Serangan	Server Tujuan Serangan	Jumlah Serangan
ip_dst_session	DNS Server NS3 (192.168.12.251) politeknikaup.ac.id (192.168.12.33) DNS Server NS4 (192.168.12.131)	13.358 serangan 122 serangan 76 serangan
tcp_dst_session	politeknikaup.ac.id (192.168.12.33)	7.953 serangan
tcp_syn_flood	politeknikaup.ac.id (103.93.191.33)	2.796 serangan
tcp_port_scan	politeknikaup.ac.id (103.93.191.33) INTEGRASI-DJPT (103.93.191.28) ESLO DJPT (103.93.190.13) SIPALKA (103.93.191.184)	12 serangan 2 serangan 2 serangan 1 serangan

2. *Defacement* adalah jenis serangan siber yang dilakukan dengan cara mengubah tampilan halaman suatu situs web secara tidak sah. Serangan ini umumnya menargetkan halaman utama (*homepage*) atau bagian publik dari sebuah situs, dan dilakukan dengan menyusup ke dalam sistem manajemen konten atau server hosting website.

Tabel 23. Serangan Siber Defacement

	Januari	Februari	Maret	Grand Total
BPPSDM	3	2		5
bbp4b.litbang.kkp.go.id	1	2		3
bp3ambon.kkp.go.id	1			1
pentaru.kkp.go.id	1			1
DJPB	2	1		3
sibatik.kkp.go.id	2	1		3
DJPRL	1			1
sidakokkhl.kkp.go.id	1			1
DJPT	1		2	3
integrasi.djpt.kkp.go.id			2	2
perizinan.kkp.go.id	1			1
PDSPKP	4	2		6
bursaikan.kkp.go.id	1	2		3
stelina.kkp.go.id	3			3
Grand Total	11	5	2	18

Aplikasi yang sering tercompromise serangan *defacement* adalah sibatik.kkp.go.id, bursaikan.kkp.go.id dan stelina.kkp.go.id. Aplikasi sibatik masih menggunakan php PHP/5.6.23 yang supportnya sudah *discontinue* sejak januari 2019 serta berada pada server *Microsoft Windows Server 2008 R2* yang juga sudah *discontinue support* sejak

januari 2020. Saat ini aplikasi sibatik masih dalam pengembangan untuk *upgrade version* dan migrasi ke sistem operasi linux.

3. *Credential Leak*

Credential Leak adalah insiden kebocoran data di mana informasi autentikasi pengguna seperti username, email, dan terutama password terekspos ke pihak yang tidak berwenang. Informasi ini bisa bocor akibat serangan siber, kesalahan konfigurasi sistem, atau kelalaian pengguna maupun pengelola sistem.

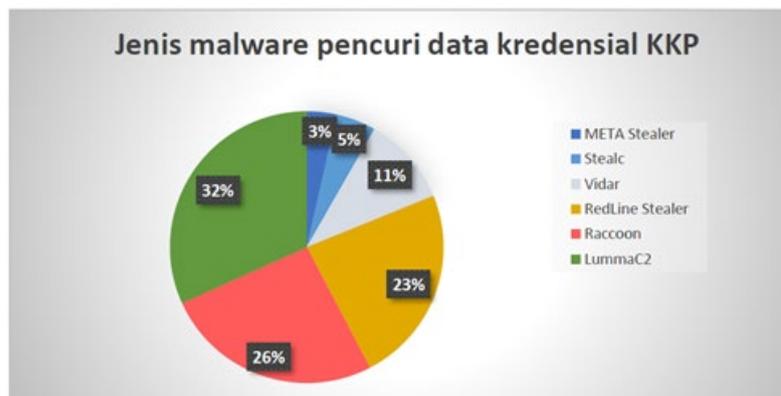
- Penyebab Umum *Credential Leak*:
 - *Phishing*: Pengguna tertipu untuk memberikan kredensial mereka kepada situs palsu.
 - *Database Breach*: Sistem diretas dan data autentikasi disalin oleh penyerang.
 - *Misconfiguration*: Data kredensial tidak disimpan dengan aman (misalnya tanpa enkripsi atau hashing).
 - *Reuse/Weak Password*: Penggunaan kata sandi yang sama di berbagai layanan membuat akun lain rentan saat satu layanan bocor.
 - *Malware Stealer* : Malware yang dirancang khusus untuk mencuri kredensial pengguna. Malware jenis ini biasanya menyusup ke perangkat korban tanpa disadari dan secara diam-diam mengumpulkan informasi sensitif seperti username, password, token akses, hingga cookies browser.
- Dampak *Credential Leak*:
 - Akses tidak sah ke akun pengguna atau sistem internal.
 - Pencurian data sensitif, termasuk informasi pribadi atau institusional.
 - Defacement melalui file upload menggunakan akun credential yang bocor.
- Tindakan Pencegahan:
 - Gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun.
 - Terapkan multi-factor authentication (MFA).

- Menggunakan EDR pada perangkat endpoint.
- Enkripsi dan hash semua data kredensial di sisi server.



Sumber: Cyber Threat Intelligence BIN

Gambar 25. Situs KKP yang terdampak kebocoran data



Sumber: Cyber Threat Intelligence BIN

Gambar 26. Jenis Malware pencuri data kredensial KKP

3. Tim Keamanan Siber dan Infrastruktur TI juga telah memenuhi permintaan Virtual Private Server untuk kebutuhan aplikasi SIPCS DJPDS, aplikasi Mandat PKRL, dan aplikasi Sibatik DJPB.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melakukan evaluasi hasil asesmen Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP yang dilakukan oleh internal KKP;

2. Melakukan koordinasi dalam rangka perbaikan Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP;
3. Monitoring dan peningkatan keamanan untuk asset elektronik KKP.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP melalui kegiatan Pelaksanaan Keamanan Siber dan Infrastruktur TI dengan anggaran awal senilai Rp. 1.905.980.000 sedangkan setelah efisiensi senilai Rp 131.400.000,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 19.924.500,- atau 15,16%.

3.3.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan

Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan. Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan merupakan alat bantu untuk mengukur penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Evaluasi Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan akan menghasilkan nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia di instansi KKP berdasarkan jawaban atas pertanyaan dalam Lembar Kerja SDI.

Pengukuran Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap aspek-aspek berikut :

1. Pembiayaan;
2. Kelembagaan;
3. SDM;
4. Teknologi Informasi;
5. Penyelenggaraan;
6. Koordinasi;
7. Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
8. Regulasi.

Evaluasi Penyelenggaraan SDI dilaksanakan pada seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mencakup pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian ini dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership dengan rincian struktur penilaian pada Gambar 1. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI).

Analisa Capaian

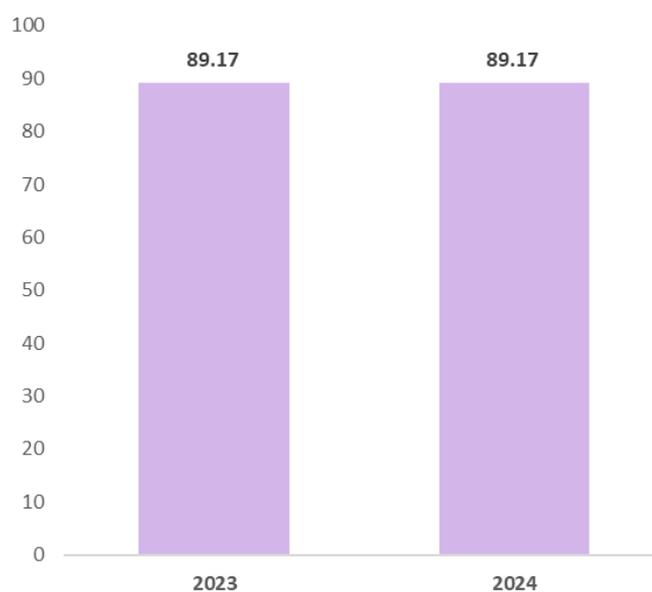
IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan												
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	%	Target 2025	% Capaian Thdp	Target 2029	% Capaian Thdp	

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029			
								Kenaikan TW I 2024-2025		Target 2025		Target 2029
-	-	-	89,17	89,17	-	-	-	-	64,68	-	74	-

Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan merupakan IKU yang baru dimulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dikarenakan baru mulai selama 2 tahun, maka capaian berupa grafik dapat disampaikan dibawah ini:



Gambar 27. Grafik Capaian IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2024

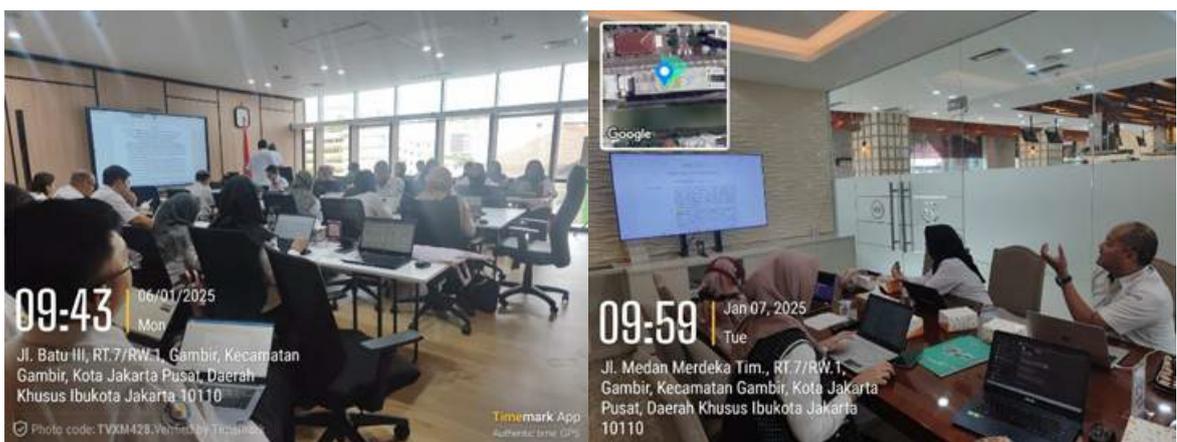
Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi) Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Validasi Nasional Semester I, dengan hasil data produksi perikanan dan kelautan;
2. Melakukan koordinasi dengan unit Eselon I terkait dan *helpdesk* pengisian/*update* data KUSUKA;

3. Melakukan koordinasi dan pembahasan capaian produksi perikanan triwulan I tahun 2025 dan justifikasi terhadap peningkatan dan penurunan produksi.
4. kegiatan pembangunan *platform* portal dan *big data engine* digitalisasi perizinan terdiri dari 12 modul, terdiri dari: Kusuka, Produksi, Validasi Nasional, Pengawasan, Bantuan Pemerintah, Satu Peta, Media Analitik, Kinerja, Big Data, Perizinan, User Management, Pendanaan Inovatif. Platform tersebut dapat diakses pada <https://portaldata.kkp.go.id>;
5. platform <https://portaldata.kkp.go.id> tersebut menyajikan data publikasi statistik dan spasial dilengkapi standard data dan metadata yang dapat diakses publik.



Gambar 28. Koordinasi Data Prioritas 2024 dan Daftar Data 2025 lingkup DJPKRL



Gambar 29. Pembahasan Draft Inmen KP Transformasi Digital

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung

Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan Validasi Nasional Semester II tahun 2024 pada Bulan Mei 2025;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Validator Pusat dan Validator Daerah untuk segera memvalidasi data-data yang telah masuk;
3. Melakukan penilaian terhadap tingkat Kematangan Informasi Geospasial Tematik KKP yang terjamin kualitasnya lingkup Eselon I pada tahun 2025.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan melalui Sektor melalui kegiatan Penyusunan Data Statistik Nasional dengan anggaran awal senilai Rp. 183.556.000 sedangkan setelah efisiensi senilai kegiatan Penyusunan Data Statistik Nasional dengan anggaran senilai Rp 6.259.000,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 5.994.000,- atau 95,77%.

3.3.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP

Definisi Indikator Kinerja

Dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dijelaskan bahwa arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE diterapkan dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yakni pada lingkup Nasional, lingkup Instansi Pusat, dan lingkup Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui, SPBE bukan hanya merupakan IKU KKP dan Pusdatin, tapi juga menjadi bagian penting dalam program Reformasi Birokrasi (RB). Pada tahun 2024, Nilai Tingkat Kebijakan Arsitektur SPBE yang digunakan untuk RB adalah nilai Indeks Indikator 1, yaitu “Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah”. Indikator 1 ini kemudian mendapatkan nilai 2 karena KKP sudah memiliki kebijakan Arsitektur SPBE, yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Arsitektur

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2024.

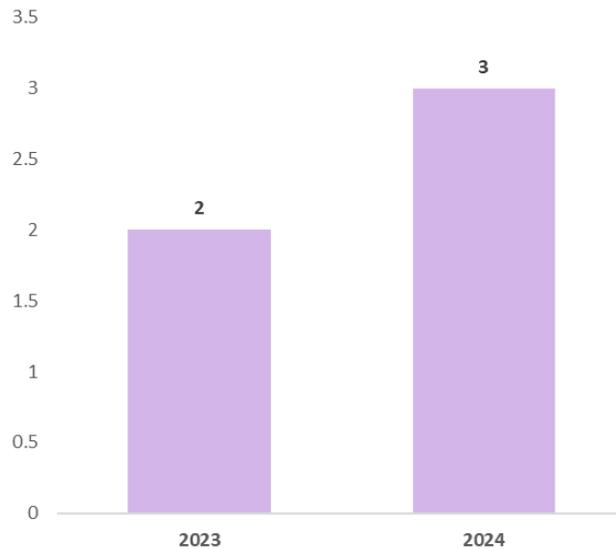
Analisa Capaian

IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB), sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 25. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	2	3	-	-	-	-	3	-	4	-

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP merupakan IKU yang baru dimulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dikarenakan baru mulai selama 2 tahun, maka capaian berupa grafik dapat disampaikan dibawah ini:



Gambar 30. Grafik Capaian IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP Tahun 2023-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi) Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melengkapi proses bisnis As-is dan To-be pada seluruh unit kerja lingkungan KKP Level 1 dengan unit kerja terkait pada seluruh unit kerja lingkungan KKP;
2. Pembahasan Draft Keputusan Menteri KP tentang Kebijakan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) SPBE dengan Biro Hukum.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melaksanakan rapat koordinasi proses bisnis As-is dan To-be pada seluruh unit kerja lingkungan KKP Level 1 dengan unit kerja terkait pada seluruh unit kerja lingkungan KKP;
2. Melakukan *review* pengisian SIA SPBE V2 dengan Kementerian PAN dan RB;
3. Mempersiapkan dokumen penilaian SIA-SPBE tahun 2025;

4. Pembahasan lanjutan Draft Keputusan Menteri KP tentang Kebijakan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) SPBE dan desain arsitektur dan peta.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP melalui kegiatan Penyusunan *Grand* Desain Arsitektur dan Peta dengan anggaran awal senilai Rp 677.418.000,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp,- atau 0% dikarenakan terdampak efisiensi anggaran.

3.3.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP

Definisi Indikator Kinerja

Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Data dan informasi statistik tersebut dikelola sesuai prinsip satu data indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Menurut pemanfaatannya, statistik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, Statistik Sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat

dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

EPSS sendiri merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

1. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

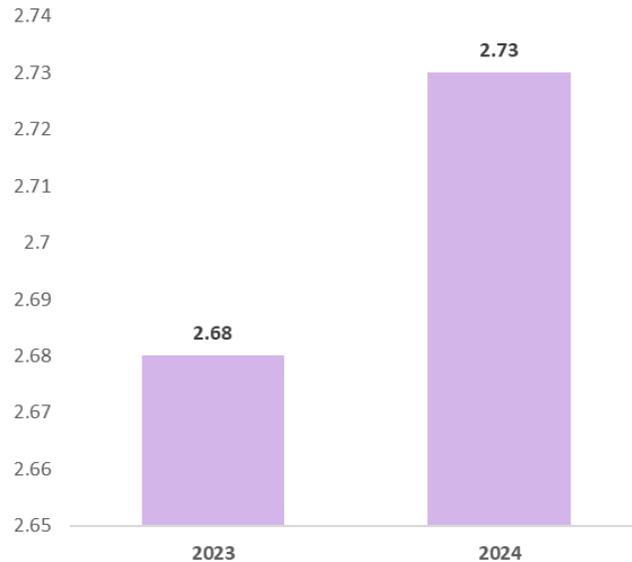
Analisa Capaian

IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 26. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	2,68	2,73	-	-	-	-	2,7	-	2,83	-

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP merupakan IKU yang baru dimulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dikarenakan baru mulai selama 2 tahun, maka capaian berupa grafik dapat disampaikan dibawah ini:



Gambar 31. Grafik Capaian IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP Tahun 2023-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)
Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Mengusulkan Kegiatan Produksi Perikanan Budi Daya melalui web Romantik BPS untuk mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS;
2. Melaksanakan kegiatan reviu terhadap domain dan indikator dalam EPSS secara menyeluruh melalui rapat koordinasi dengan produsen data terkait.



Gambar 32. Pembinaan Statistik Sektoral

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, terkendala dikarenakan dengan adanya efisiensi anggaran

nasional, sehingga BPS meniadakan penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP untuk tahun 2025.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui kegiatan Penyusunan Data Statistik Nasional dengan anggaran awal senilai Rp. 183.556.000 sedangkan setelah efisiensi senilai Rp 6.259.000,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 5.994.000,- atau 95,77%.

3.3.12 Indeks Pelayanan Publik KKP

Definisi Indikator Kinerja

Pelayanan merupakan bagian integral dan strategis bagi pengembangan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan serta pemenuhan pelayanan publik. Keberhasilan birokrasi dan pelayanan yang berkualitas merupakan harapan masyarakat. Kesadaran Unit Pelayanan Publik dalam mewujudkan Pelayanan Prima agar masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, salah satunya diwujudkan dengan melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada Pasal 7 ayat (2) huruf b juga mengamanatkan kepada Penanggung jawab untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Merujuk pada ketentuan tersebut, perbaikan atas kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari seluruh instansi penyelenggara pelayanan. Dengan demikian, kebutuhan akan pelayanan yang berkualitas menjadi prioritas untuk diwujudkan. PEKPPP merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guna meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Pelaksanaan PEKPPP telah dilakukan setiap tahun yang menghasilkan nilai IPP. Dari kegiatan yang telah dilakukan secara periodik itu, kegiatan pemantauan atas hasil evaluasi belum menjadi bagian yang penting untuk dilakukan dan hanya berfokus pada kegiatan evaluasi. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kegiatan pemantauan agar proses PEKPPP seluruhnya dapat berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan PEKPPP dapat dilakukan secara langsung di lokasi Unit Lokus Evaluasi (ULE) maupun secara *daring*.

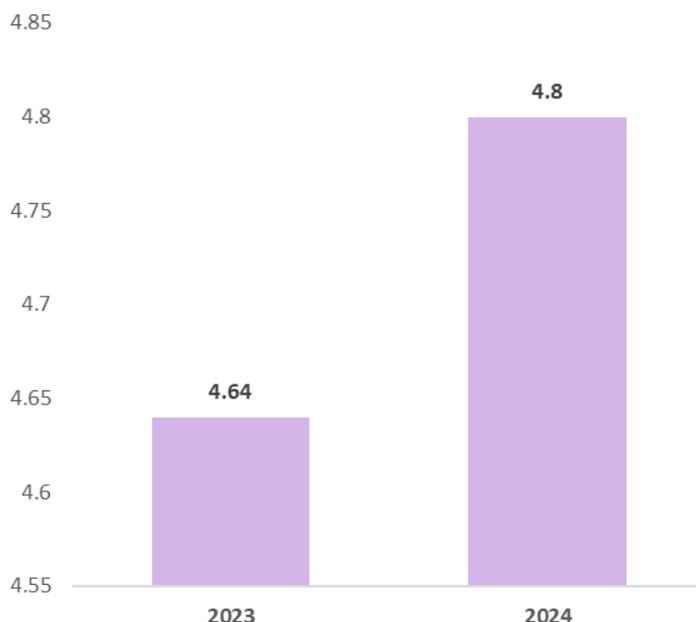
Analisa Capaian

IKU Indeks Pelayanan Publik KKP merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB), sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 27. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Indeks Pelayanan Publik KKP											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	4,64	4,80	-	-	-	-	4,6	-	4,8	-

Indeks Pelayanan Publik KKP merupakan IKU yang baru dimulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dikarenakan baru mulai selama 2 tahun, maka capaian berupa grafik dapat disampaikan dibawah ini:



Gambar 33. Grafik Capaian IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Tahun 2023-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi) Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

Pusat Data Statistik dan Informasi selaku penanggungjawab pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Penyampaian hasil pelaksanaan PEKPPP Mandiri Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 kepada Sekretaris Eselon I dan seluruh UPP dengan disertai hasil analisis capaian melalui Surat Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor B.243/SJ.7/TU.210/I/2025 tanggal 17 Januari 2025;
2. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional Tahun 2024 pada tanggal 21 Januari 2025 bersamaan dengan agenda evaluasi jenis pelayanan publik;



Gambar 34. Evaluasi hasil pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional Tahun 2024

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Menyusun Tim PEKPPP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Badan; dan
2. Menyampaikan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada seluruh UPP lingkup KKP.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Pelayanan Publik KKP melalui kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan anggaran Awal seniali Rp. 519.613.000 sedangkan setelah efisiensi senilai Rp 476.000,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 476.000,- atau 100%.

3.3.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

Definisi Indikator Kinerja

Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai tahun 2022 Ombudsman RI melakukan penyempurnaan lagi atas metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian dilakukan tidak hanya atas

ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Maksud dari penilaian ini yaitu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengaduan. Semua penilaian tersebut, menjadi komponen dari Opini Pengawasan Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Perubahan ini diharapkan menjadi lebih komprehensif lagi dalam menakar mutu pelayanan publik: dimensi input dan proses (*service manufacturing*) hingga *output* dan dampak (*impactful public service*).

Kemudian pada tahun 2023 kembali dilakukan penyempurnaan dan pengembangan variabel serta indikator penilaian yaitu: penilaian pada Kementerian dan Lembaga ditambahkan variabel Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan penilaian pada Pemerintah Daerah ditambahkan Standar Pelayanan Minimal. Dimana hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.

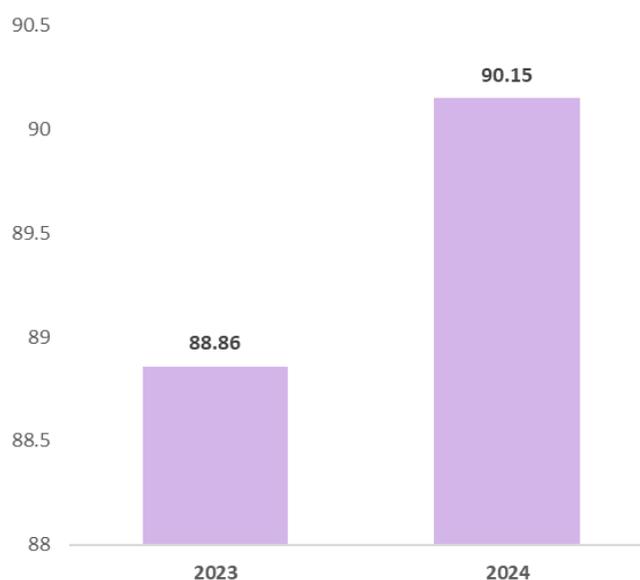
Analisa Capaian

IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 28. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2023-2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	-	88,86	90,15	-	-	-	-	88,87	-	88,99	-

Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP merupakan IKU yang dimulai tahun 2023 sampai dengan sekarang. Capaian berupa grafik IKU ini selama 2 tahun dari Tahun 2023-2024 dapat disampaikan dibawah ini:



Gambar 35. Grafik Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP Tahun 2021-2024

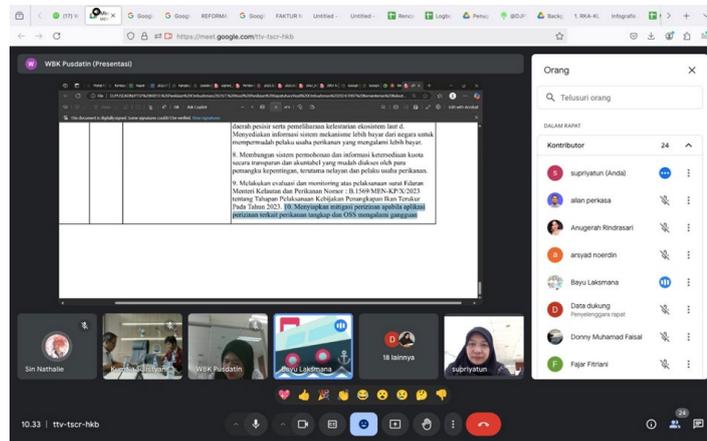
Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi) Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Menyampaikan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 kepada seluruh UPP Pusat yang menjadi Lokus

Penilaian, melalui Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi sebagai berikut:

- a. Nomor 1/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Direktorat Penataan Ruang Laut;
 - b. Nomor 2/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan;
 - c. Nomor 3/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - d. Nomor 4/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada; dan
 - e. Nomor 5/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen.
2. Menyampaikan rekomendasi Ombudsman RI yang perlu ditindaklanjuti kepada Lokus UPP berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, melalui Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 6/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Pemberitahuan untuk Menindaklanjuti Produk Pengawasan Ombudsman RI dalam rangka mendukung Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan tenggat waktu sampai dengan bulan Maret 2025.

3. Melaksanakan koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI melalui kegiatan rapat melibatkan Inspektorat Jenderal, Ditjen. Perikanan Tangkap, dan Ditjen. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.





Gambar 36. penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI

4. Menyampaikan hasil tindak lanjut Kementerian Kelautan dan Perikanan atas rekomendasi Ombudsman RI melalui surat Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.163/MEN-SJ/TU.220/II/2025 tanggal 20 Februari 2025.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan pegawai pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai antara 78,00 – 100 (zona hijau) berdasarkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. sertifikat penghargaan bagi UPP yang memperoleh nilai 78,00 - 100 (zona hijau), yaitu:
 - a. Direktorat Penataan Ruang Laut;
 - b. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan;
 - c. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - d. Direktorat Pemantauan Operasi dan Armada; dan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen;
 - e. sertifikat penghargaan bagi pejabat/pegawai UPP yang menjadi responden pada kegiatan penilaian kepatuhan tahun 2024.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP melalui kegiatan Penyusunan Standar Layanan Perizinan Terpadu dengan anggaran pagu awal senilai Rp. 108.687.000 sedangkan pagu setelah efisiensi senilai Rp 3.592.000,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 3.432.000,- atau 95,55%.

3.3.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP

Definisi Indikator Kinerja

Dalam rangka mengetahui dan mengukur sejauh mana kualitas pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan, yaitu dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkungan KKP.

Analisa Capaian

IKU SKM merupakan Indikator Kinerja yang dihitung berdasarkan periode triwulanan. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 1124/SJ.8/TU.140/IV/2025 tanggal 11 April 2025 dari Kepala Pusat Data dan Informasi mengenai Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian, capaian

IKU Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP periode Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **91,80** dengan kategori ‘Sangat Baik’.

Tabel 29. Hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan I Tahun 2025

Unit Eselon I	UPP Aktif	UPP Melakukan SKM	Layanan dilaksanakan SKM	Jumlah Responden	Nilai SKM
DJPKRL	12	12	13	367	95,80
DJPT	26	26	36	4.551	91,70
DJPB	17	17	8	1.072	92,62
DJPDSPKP	3	3	8	36	87,27
DJPSDKP	15	15	4	1.100	92,24
BPPSDMKP	17	14	34	2.657	89,62
BPPMHKP	47	47	14	2.553	93,58
SETJEN (PTSA)	1	1	23	179	86,31
KKP	138	135	124	12.515	91,80 Sangat Baik

Rincian nilai per Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

Tabel 30. Hasil Nilai Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan I Tahun 2025

Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1 - Persyaratan Layanan	3,72
U2 - Kemudahan Prosedur	3,69
U3 - Waktu Penyelesaian	3,66
U4 - Kesesuaian Biaya	3,67
U5 - Kesesuaian Produk	3,67
U6 - Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas	3,64
U7 - Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas	3,67
U8 - Layanan Konsultasi	3,67
U9 - Kualitas Isi/Sarana Prasarana	3,66

Tabel 31. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Survei Kepuasan Masyarakat KKP												
Realisasi Triwulan I					2025				Rancangan Renstra 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029	
-	-	-	-	90,94	87	91,80	105,52	2,53	87	105,52	89,95	102,05	

Survei Kepuasan Masyarakat dengan manual IKU baru merupakan IKU dimulai pada triwulan ke empat tahun 2023 sampai dengan sekarang. Pada Tabel diatas terlihat bahwa realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP adalah 91,80 yang artinya capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 87 dengan capaian 105,52%. Analisis atas hasil SKM KKP Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah responden sebanyak 12.515 dengan IKM sebesar 91,80 kategori mutu pelayanan “Sangat Baik (A)”. Jumlah responden turun 15% dibandingkan triwulan IV Tahun 2024, sementara itu naik 5% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu triwulan I Tahun 2024. Salah satu hal yang mempengaruhi penurunan jumlah responden adalah jumlah hari kerja aktif yang lebih sedikit terkait libur hari raya dan cuti bersama Idul Fitri 2025;
2. Terdapat penyesuaian jumlah UPP Aktif di lingkungan KKP dikarenakan adanya perubahan kewenangan atas layanan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Terdapat 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berubah status menjadi Non UPP, yaitu Direktorat Pengolahan, Direktorat Logistik, dan Direktorat Rumput Laut;
3. Persentase UPP yang melaksanakan SKM Triwulan I Tahun 2025 sebesar 98%, yaitu 135 (seratus tiga puluh lima) UPP yang terdiri dari 14 (empat belas) Unit Pelaksana Pusat dan 121 (seratus dua puluh satu) Unit Pelaksana Teknis;
4. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal, dan Balai Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tidak memiliki responden SKM karena belum ada kegiatan pelayanan berupa pelatihan dan sertifikasi. Sementara itu, 2 (dua) UPP dengan responden tunggal yang dianggap valid, yaitu pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung, Lampung;
5. Hasil SKM triwulan I Tahun 2025 merupakan representasi atas 124 (seratus dua puluh empat) layanan yang ada dalam Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022, dengan layanan terbanyak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebanyak 36 layanan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebanyak 34 layanan; dan

6. Keseluruhan unsur pelayanan atas IKM KKP mendapatkan Nilai rata-rata (NRR) lebih dari 3 (tiga) dengan rata-rata keseluruhan 3,67 dengan IKM sebesar 91,80. Sementara itu, 3 (tiga) unsur pelayanan dengan nilai terendah yang perlu menjadi bahan evaluasi, yaitu U6 - Kecepatan Respon atau Kompetensi Petugas, U3 - Waktu Penyelesaian, dan U9 - Kualitas Isi/Sarana Prasarana.

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi) Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. melakukan validasi hasil responden yang dihimpun melalui *Tools* SKM bersama Sekretariat Eselon I, yaitu hasil SKM Triwulan I Tahun 2025.

Eselon I	Jumlah UPP Aktif	UPP Melakukan SKM	Jumlah Layanan	Jumlah Responden	Nilai SKM	Mutu Pelayanan
DJPKRL	12	12	13	380	95,33	Sangat Baik (A)
DJPT	26	26	36	4.551	91,70	Sangat Baik (A)
DJPB	17*	17	8	1.072	92,62	Sangat Baik (A)
DJPDSPKP	2**	3	8	36	87,27	Baik (B)
DJPSPDKP	15	15	5	1.146	92,26	Sangat Baik (A)
BPPSDMKP	17	14***	34	2.657	89,62	Sangat Baik (A)
BPPMHKP	47	47	14	2.553	93,58	Sangat Baik (A)
SETJEN (PTSA)	1	1	23	179	86,31	Baik (B)
TOTAL	137	135	125	12.574	91,79	Sangat Baik (A)

Masih ada hasil SKM pada Dit. Pemasaran, apakah perlu disesuaikan masuk ke Dit. Pemberdayaan Usaha?

Data per: triwulan I 2025
Diakses: 2025-04-10 10:00

*) Dit. Rumput Laut tidak lagi memiliki pelayanan (Non-UPP)
**) Dit. Pemasaran dan Dit. Logistik tidak lagi memiliki pelayanan (Non-UPP)
***) Sebanyak 3 UPP tidak memiliki responden, yaitu: Poltek KP Sorong, SUPM Tegal, BPPP Perikanan Banyuwangi

Gambar 37. Validasi SKM TW I Tahun 2025

2. menyampaikan hasil pelaksanaan SKM Tahun 2024 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KKP Tahun 2024 kepada seluruh Eselon I penyelenggara pelayanan publik melalui Nota Dinas Kepala Pusat Data,

Statistik, dan Informasi Nomor 317/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. menghimbau UPP dan/atau Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan untuk memperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau sesuai dengan jumlah layanan yang diberikan oleh UPP;
2. menghimbau UPP dan/atau Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan untuk menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan rencana tindak lanjut prioritas perbaikan, penyusunan laporan hasil SKM untuk diunggah pada Tools SKM melalui menu "Upload Laporan Monev";
3. melakukan *remapping* atas seluruh UPP di lingkungan KKP berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KKP terbaru, khususnya pada Ditjen. Pengelolaan Ruang Laut dan Ditjen. Pengelolaan Kelautan.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP melalui kegiatan Monev Layanan Perizinan Terpadu dengan anggaran Awal seniali Rp. 517.764.000 sedangkan pagu setelah efisiensi senilai Rp 55.124.000- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 54.958.780,- atau 99,70%.

3.3.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin

Definisi Indikator Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan pengetahuan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan pelaksanaan SAKIP lingkup Pusdatin adalah untuk:

1. Mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Pusdatin
2. Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan bersifat orientasi;
3. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP lingkup Pusdatin;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi lingkup Pusdatin; dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan nilai SAKIP merupakan hasil dari peningkatan nilai pada semua komponen. Berikut merupakan rincian hasil evaluasi AKIP KKP Tahun 2022 sampai 2024: Tabel 7. Rincian Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2022-2024.

Analisa Capaian

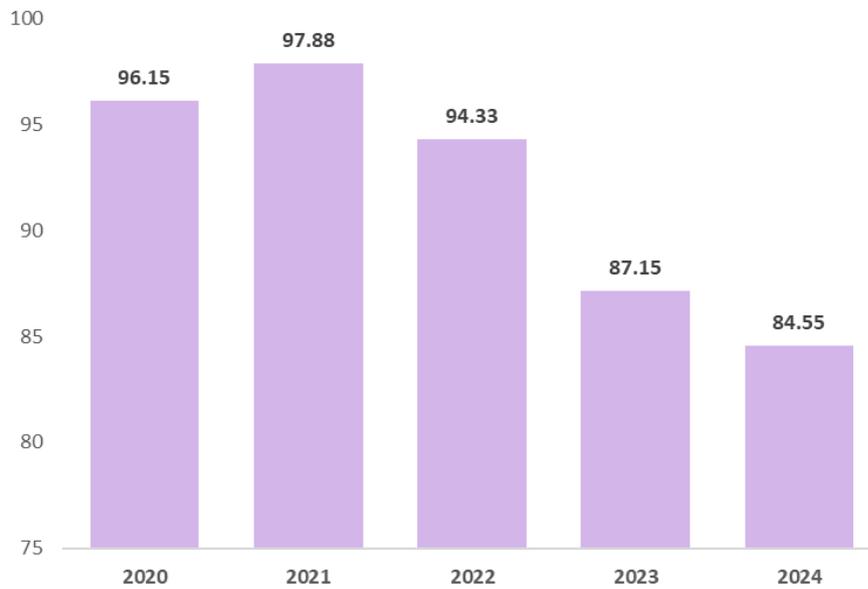
IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan, sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 32. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW IV 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi												
Nama IKU	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin												
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029				
96,15	97,88	94,33	87,15	84,55	-	-	-	-	87	-	87,8	-	

Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin periode tahun 2020-2024 dapat disampaikan pada grafik dibawah ini:



Gambar 38. Grafik Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2020-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi) Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Menyiapkan seluruh dokumen pendukung PM SAKIP, yang terdiri dari:
 - a. Perjanjian Kinerja;
 - b. Manual IKU;
 - c. Rincian Target IKU;
 - d. Rencana Aksi;
 - e. Laporan Kinerja Level 2;
 - f. Data dukung Laporan Kinerja.

2. Menginput perencanaan dan hasil kinerja satuan kerja di aplikasi KINERJAKU Triwulan I tahun 2025;
3. Melakukan Dialog Kinerja Tahun 2025 melalui apel bersama dengan substansi yang dibahas yaitu pencapaian kinerja Pusdatin, Validasi Perencanaan Kinerja Tahun 2025, Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
4. Menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk monitoring kinerja individu;
5. Rapat Tim Pengelolaan Kinerja untuk memantau target, realisasi, capaian dan data dukung yang diinput pada aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2025;
6. Meng-*upload* dokumen kelengkapan SAKIP Pusdatin ke dalam *google drive*, <http://bit.ly/DokumenSAKIPSetjen> dan <http://bit.ly/DokumenSAKIP Pusdatin>.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Menyiapkan data capaian yang dihitung secara triwulanan;
2. Menyiapkan Laporan Kinerja triwulan selanjutnya di tahun 2025 dan data dukungnya agar dapat disampaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan hasil *review* oleh Tim SAKIP KKP.



Gambar 39. Rapat Penyiapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Monitoring Kinerja Individu

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi dengan anggaran senilai Rp 0,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 0,- atau 0% dikarenakan terdampak efisiensi anggaran.

3.3.16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

Definisi Indikator Kinerja

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Data, Statistik, dan Informasi adalah sebagaimana tercantum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2025, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

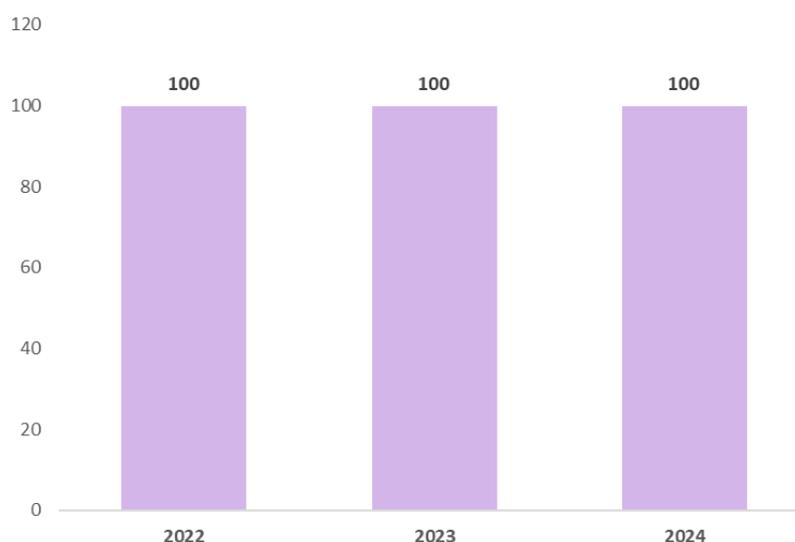
Analisa Capaian

IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP merupakan IKU yang dihitung dalam periode semesteran, sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 33. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	100	100	100	-	-	-	-	100	-	100	-

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP periode tahun 2022-2024 dapat disampaikan pada grafik dibawah ini:



Gambar 40. Grafik Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP Tahun 2020-2024

Pada triwulan I tahun 2025 Pusdatin mengajukan program penyusunan Keputusan Menteri tentang Nama layanan publik dan produk layanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan target penyelesaian Keputusan Menteri pada bulan April. Perkembangan saat ini, permohonan paraf Rancangan Keputusan Menteri melalui nota dinas Sekretaris Jenderal

kepada pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan KKP, Nomor 450/SJ/HK.160/III/ 2025, tanggal 18 Maret 2025.

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)
Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Penyampaian Draf Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik kepada Biro Hukum untuk dibahas dan *direview*;
2. Kepala Biro Hukum telah menyampaikan nota dinas kepada pimpinan unit organisasi eselon II terkait dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik, untuk mendapatkan masukan;
3. Proses permohonan paraf Rancangan Keputusan Menteri melalui nota dinas Sekretaris Jenderal kepada pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan KKP, Nomor 450/SJ/HK.160/III/2025, tanggal 18 Maret 2025, hal Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Berbagi Pakai Data, antara lain dengan Badan Karantina Ikan, Pushidros AL, dan BRI.



Gambar 41. Rapat Koordinasi Pembahasan IKU Mandatory Peraturan Perundang2an lingkup KKP

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik;
2. Menyiapkan draft Keputusan Menteri lingkup bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan berikutnya;
3. Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Berbagi Pakai Data, antara lain dengan Badan Karantina Ikan, Pushidros AL, dan BRI.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Penyempurnaan Peraturan dan Perjanjian Kerjasama Data, Statistik dan Informasi dengan anggaran pagu Awal senilai Rp.323.674.000,- sedangkan setelah Efisiensi senilai Rp 12.049.000,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 11.707.300,- atau 90,16%.

3.3.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin

Definisi Indikator Kinerja

Pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terkendali/terkontrol, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit per semester setiap tahunnya. Teknik menghitung indikator ini yaitu:

1. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil *review* Itjen terhadap Laporan Keuangan (LK) Semester II tahun berjalan (dengan batas waktu penyelesaian bulan September) dan LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian bulan Februari n+1), baik jumlah kejadian maupun nilai uang;
2. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian 7 hari kerja setelah diterimanya CATATAN HASIL PEMERIKSAAN), baik jumlah kejadian maupun nilai uang; dan
3. Bobot jumlah kejadian dengan nilai uang adalah 50% : 50%.

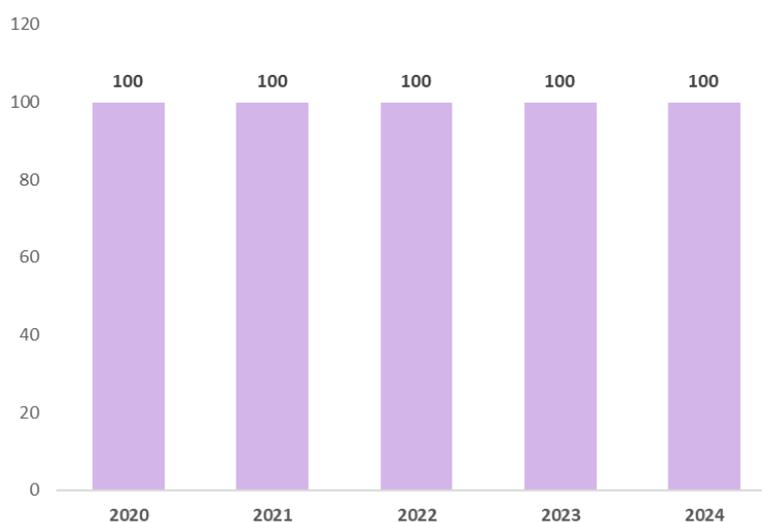
Analisa Capaian

IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan, sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 34. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi												
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin												
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	
100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	-	100	-	

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin dari tahun 2020-2024, dapat digambarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 42. Grafik IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin Tahun 2020-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi) Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Menyiapkan data dukung dalam rangka audit yang dilakukan oleh BPK Tahun 2025;
2. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti temuan BPK, dengan melengkapi data dukung rekomendasi hasil audit;
3. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan sebagai Tim Tindak Lanjut Lingkup Sekretariat Jenderal;
4. Monitoring kegiatan penyelesaian temuan BPK lingkup Pusdatin tahun sebelumnya;
5. Peningkatan kepatuhan satuan kerja mengirim laporan bulan secara tepat waktu secara *online*.



Gambar 43. Monitoring kegiatan penyelesaian temuan BPK lingkup Pusdatin

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit tim BPK;
2. Peningkatan kepatuhan satuan kerja mengirim laporan bulan dan monitoring secara tepat waktu secara *online*.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK pada Lingkungan Pusdatin melalui kegiatan Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/Penatausahaan Keuangan/Penatausahaan BMN

dengan anggaran revisi senilai Rp 278.302.000,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 78.733.412,- atau 28,29%.

3.3.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin

Definisi Indikator Kinerja

Indeks profesionalitas (IP) ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Komponen IKU IP ASN terdiri dari:

1. **Kualifikasi (bobot 25%)** yaitu sesuai dengan pendidikan terakhir dari masing-masing pegawai:
2. **Kompetensi (bobot 40%)** terdiri dari:
 - a. Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);
 - b. Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
 - c. Diklat 20 JP (Jam Pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua koma lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;

- d. Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);
3. **Kinerja (bobot 30%)** merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 3600;
 4. **Disiplin (bobot 5%)** mengambil dari hukuman disiplin apakah sudah diterima atau belum, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinya.
- Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN) Tahun 2024 Kategori dalam Pengukuran IP ASN yaitu:

Tabel 35. Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nilai	Kategori
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi
3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	0 - 60	Sangat Rendah

Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

- Kualifikasi bobot nilai 25:

Tabel 36. Kualifikasi bobot nilai 25 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA / Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi bobot nilai 40:

Tabel 37. Kualifikasi bobot nilai 40 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-

	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

- Kinerja bobot nilai 30:

Tabel 38. Kualifikasi bobot nilai 30 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Keterangan Nilai Kinerja ***)	Nilai Kinerja	Nilai
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

- Disiplin bobot nilai 5:

Tabel 39. Kualifikasi bobot nilai 5 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nama Hukuman Disiplin *****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Ringan</i>	3

3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Sedang</i>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Berat</i>	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir.

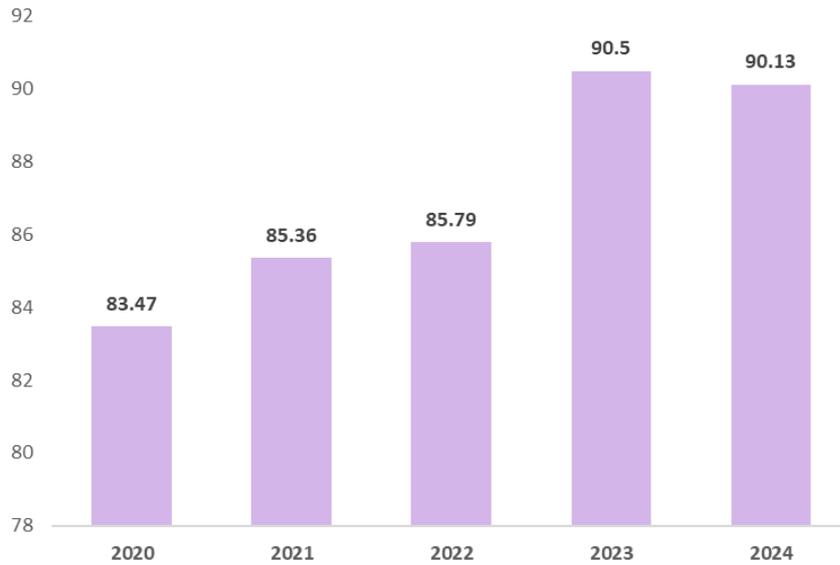
Analisa Capaian

IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin merupakan IKU yang dihitung dalam periode semesteran, sehingga pada Triwulan I tahun 2025 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Tabel 40. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin											
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
83,47	85,36	85,79	90,50	90,13	87	-	-	-	87	-	89	-

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin periode Tahun 2020-2024, dapat digambarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 44. Grafik IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Tahun 2020-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. ASN Pusdatin mengikuti pelatihan-pelatihan secara *daring* dan *luring* untuk meningkatkan kompetensi SDM Pusdatin;
2. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) KKP/pemetaan SDM berdasarkan Analisa Jabatan;
3. Memberikan motivasi tugas belajar/ijin belajar kepada pegawai Pusdatin;
4. Penertiban pengisian SKP;
5. Penertiban LHKPN/LHKSN dengan sosialisasi dari Biro SDMAO;
6. Penentuan PIC untuk kelengkapan SKP dan LHKPN/LHKSN;
7. Monitoring disiplin presensi pegawai lingkup Pusdatin.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Memberikan informasi pelatihan/Bimtek dan seminar terkait dengan kompetensi pegawai lingkup Pusdatin baik secara *daring* atau *luring* secara kontinyu berdasarkan kompetensi dan kebutuhan;

2. Mengusulkan diklat fungsional untuk pejabat fungsional kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP dan Biro SDMAO;
3. Mengumpulkan dan menginput data dukung dari masing-masing pejabat dan pelaksana untuk meningkatkan nilai kompetensi SDM di lingkup Pusdatin;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pusdatin melalui kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM (Sertifikasi) Bidang Data Statistik dan Informasi dengan anggaran senilai Rp 745.690.000,- dan setelah efisiensi senilai Rp.2.500.000 sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 2.500.000,- atau 100%.

3.3.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin

Definisi Indikator Kinerja

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Pusdatin merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satuan Kerja Pusdatin berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawai.

Sedangkan cara pengukurannya yaitu jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh Satker Pusdatin yang menjadi objek pengawasan sebanyak minimal 95% dari seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal KKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya.

Analisa Capaian

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin merupakan IKU yang dihitung dalam periode triwulanan.

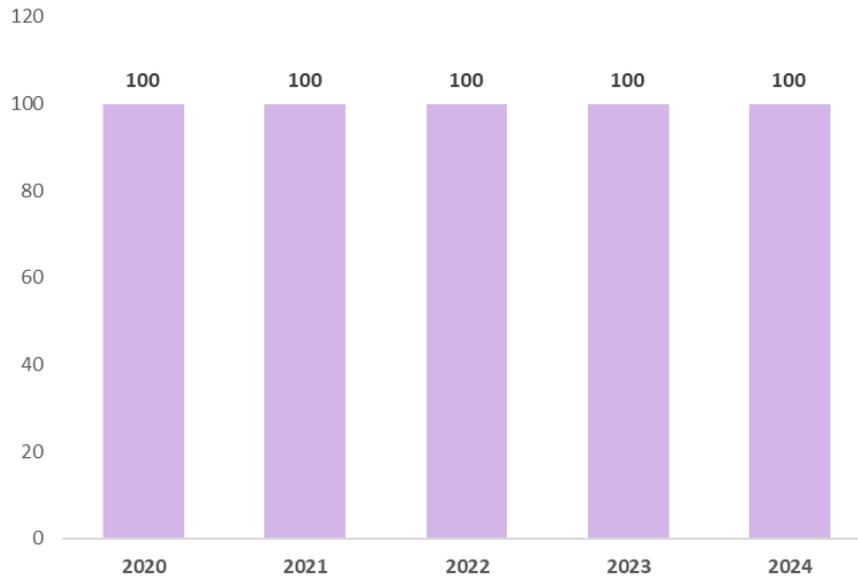
Tabel 41. Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2025

No.	Eselon II	Jumlah Rekom	TL (Tuntas)	Nilai Uang	TL (Tuntas)	Capaian IKU (100%)	Sisa Rekom
1	Biro Perencanaan	13	13	30.927.500	30.927.500	100%	0
2	Biro Keuangan dan BMN	5	5	-	-	100%	0
3	Biro Umum dan PBJ	10	9	-	-	90%	1
4	Biro Hukum	3	3	-	-	100%	0
5	Biro SDMAO	3	3	-	-	100%	0
6	Biro HKLN	0	0	-	-	100%	0
7	Pusdatin	7	7	-	-	100%	0
8	LPMUKP	0	0	-	-	100%	0
9	BPISDKP	0	0	-	-	100%	0
SETJEN		41	40	30.927.500	30.927.500	97,56%	0

Tabel 42. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin											
Realisasi Triwulan I					2025				Rancangan Renstra 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026
100	100	100	100	100	85	100	117,65		85	117,65	85	100

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin periode Tahun 2020-2024, dapat digambarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 45. Grafik IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin Tahun 2020-2024

Berdasarkan Memorandum Nomor 1053/SJ.2/TU.140/IV/2025 dari Kepala Biro Keuangan dan BMN tanggal 11 April 2025, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2025, Pusdatin mendapatkan nilai sebesar **100%** dengan capaian 117,65%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasinya telah melebihi target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 85%, dikarenakan seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin telah dilaksanakan. Jika dibandingkan dengan Biro lain Pusdatin mendapatkan nilai yang sama sebesar 100% dengan 7 (tujuh) biro dan di atas Biro Umum dan PBJ yang mendapatkan nilai sebesar 90%.

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi) Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan untuk penyelesaian dan tindak lanjut rekomendasi; dan

2. Memberikan data dukung rekomendasi dan saran hasil evaluasi/*review* dari Inspektorat Jenderal KKP.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin pada triwulan selanjutnya.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pusdatin melalui kegiatan Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/Penatausahaan Keuangan/Penatausahaan BMN dengan anggaran revisi senilai Rp 278.302.000,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 78.733.412,- atau 28,29%.

3.3.20 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin

Definisi Indikator Kinerja

IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan capaian realisasi anggaran Pusdatin tahun 2025, dan merupakan hasil perhitungan capaian realisasi anggaran yang dibandingkan dengan pagu anggaran Pusdatin tahun 2025.

Analisa Capaian

IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan, namun berdasarkan pemantauan pada Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan realisasi Pusdatin s.d Triwulan I tahun 2025 senilai Rp 4.101.629.963,- atau mencapai 4,27% terhadap Pagu Anggaran dan sebesar 15,13.% terhadap pagu efektif.

Tabel 43. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu		Realisasi		%		Sisa Anggaran per 31 Maret 2025	
		Efisiensi (Rp)	Efektif (Rp)	Total (Rp)	Efektif (Rp)	Total	Efektif	Total (Rp)	Efektif (Rp)
Pengelolaan Data dan Informasi	27.211.038.000	26.764.916.000	446.122.000	306.350.667	306.350.667	1,13	68,67	26.904.687.333	139.771.333
Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	68.938.383.000	42.276.786.000	26.661.597.000	3.795.279.296	3.795.279.296	5,51	14,24	65.143.103.704	22.866.317.704
TOTAL	96.149.421.000	69.041.702.000	27.107.719.000	4.101.629.963	4.101.629.963	4,27	15,13	92.047.791.037	23.006.089.037

Tabel 44. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi												
Nama IKU	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin												
Realisasi Tahun 2020-2024					2025				Rancangan Renstra 2025-2029				
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW I	Realisasi	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	
98,16	99,06	99,45	99,15	99,49	95	-	-	-	95	-	96	-	

Capaian IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin periode Tahun 2020-2024, dapat digambarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 46. Grafik IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Tahun 2020-2024

Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)
Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;
2. Melakukan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu disampaikan kepada Bendahara Keuangan;
3. Melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan anggaran;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan PBJ selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang telah ditetapkan;
2. Mempercepat proses administrasi pertanggungjawaban keuangan; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan PBJ selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin melalui kegiatan Pelayanan Organisasi, Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin/Penatausahaan Keuangan/Penatausahaan BMN dengan anggaran revisi senilai Rp 278.302.000,- sedangkan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 78.733.412,- atau 28,29%.

3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan Pusdatin dengan DIPA Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp 96,149,421,000,- dan terdapat 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dan Pengelolaan Data dan Informasi (2329). Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dengan 2 Rincian Output (RO) yaitu (1) Layanan Umum dan (2) Layanan Perkantoran

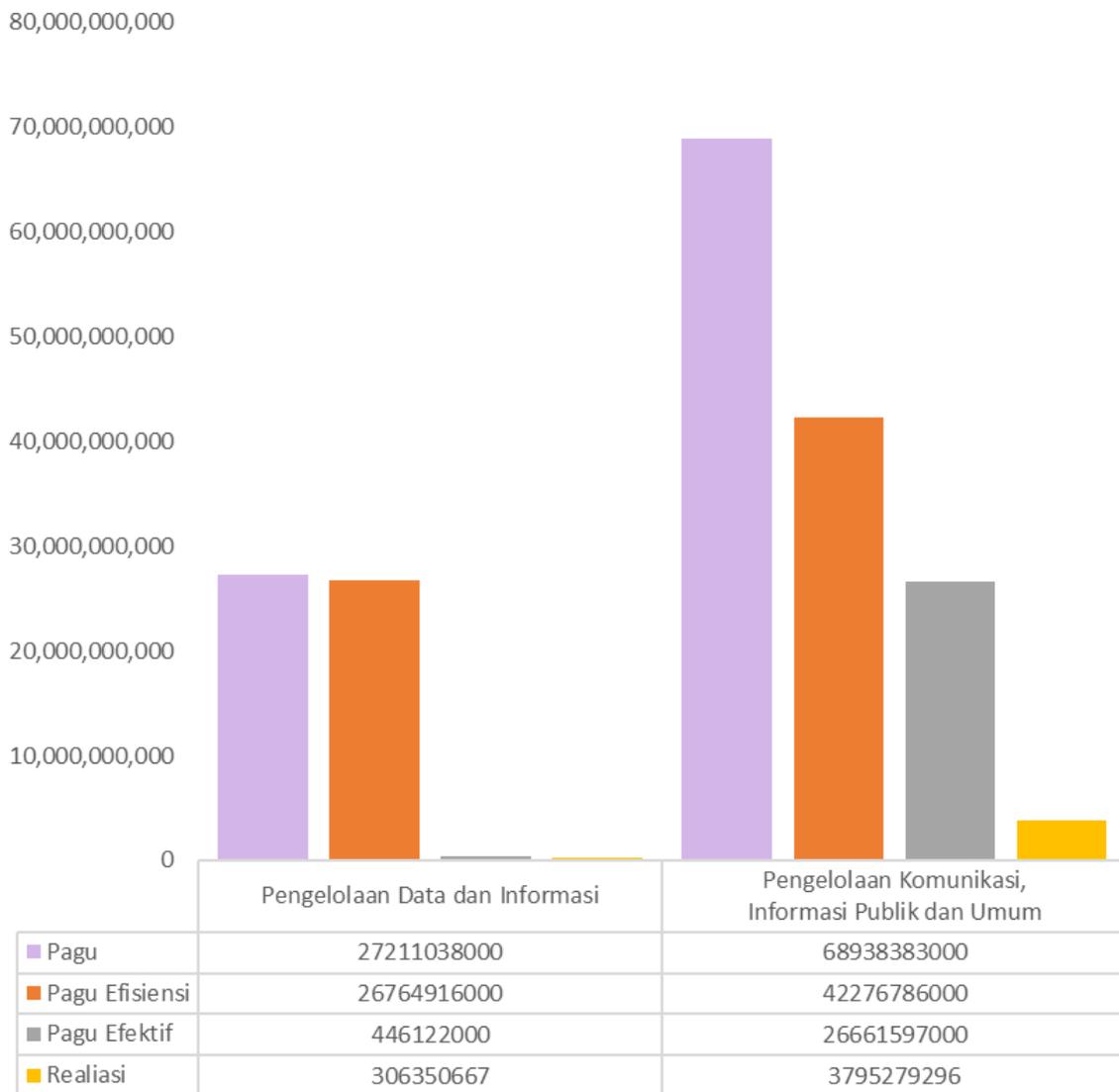
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi (2329) masih menjadi kegiatan Teknis Pusdatin, dengan 4 Rincian Output (RO) yaitu (1) Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan; (2) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal; dan (3) Sistem Informasi Pemerintahan; dan terdapat kegiatan Prioritas Nasional dengan Rincian Output (RO) yaitu (4) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kedua program tersebut masuk ke dalam Program Dukungan Manajemen.

Untuk penjelasan lebih rinci, alokasi pagu dan realisasi anggaran Pusdatin sampai dengan 31 Maret 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 45. Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Triwulan I Tahun 2025

Rincian Output (RO)	Pagu (Rp)	Pagu Efisiensi (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran Efektif		Sisa Anggaran Efektif per 31 Maret 2025 (Rp)
				(Rp)	(%)	
Pengelolaan Data dan Informasi	27.211.038.000	26.764.916.000	446.122.000	306.350.667	68,67	139.771.333
Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	68.938.383.000	42.276.786.000	26.661.597.000	3.795.279.296	14,24	22.866.317.704
TOTAL	96,149,421,000	69.041.702.000	27.107.719.000	4.101.629.963	15,13	23.006.089.037

Untuk total pagu Anggaran Pusat Data Statistik dan Informasi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 96,149,421,000,- blokir efisiensi sampai akhir tahun senilai Rp 69.041.704.000,- atau 71,81 % dari total pagu Anggaran, sedangkan untuk pagu efektif senilai Rp 27.107.719.000,- dan realisasi per 31 Maret 2025 senilai Rp 4.101.629.963,- atau 15,13 % adapun sisa pagu efektif senilai Rp 23.006.089.037,-



Gambar 47. Capaian Realisasi Anggaran Pusdatin Triwulan I Tahun 2025

BAB. IV

PRESTASI & KEGIATAN LAIN

4.1 Penghargaan



Gambar 48. Penghargaan Top 5 Pembina Penyelenggara Inovasi Terbaik Kelompok Kementerian pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) oleh Kementerian PANRB Tahun 2024

Penghargaan Pusdatin sebagai Top 5 Pembina Penyelenggara Inovasi Terbaik Kelompok Kementerian pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) oleh Kementerian PANRB Tahun 2024 dengan Nomor: B.395/MEN-KP/III/2025.



BAB.V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada tahun 2025 Pusdatin memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja terdapat terdapat dua (2) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, dua (2) secara semesteran, dan enam belas (16) secara tahunan..

Berikut adalah capaian kinerja Pusat Data dan Informasi pada Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan aplikasi Kinerjaku:

1. Nilai Kinerja Organisasi Pusdatin pada aplikasi Kinerjaku di Triwulan I Tahun 2025 adalah **111,59**.
2. Terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya dinilai pada triwulan I tahun 2025, yaitu:
 - a. Survei Kepuasan Masyarakat KKP (**realisasi: 91,80 dan capaian : 105,52%**);
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (**realisasi: 100 dan capaian : 117,65%**);
3. Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Efisiensi* Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan Efisiensi senilai **Rp 69.041.702.000,-** atau sebesar **71,81%** dari total pagu anggaran.
4. Realisasi Penyerapan DIPA Pusdatin per 31 Maret tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI dari pagu senilai **Rp 96.149.421.000,-** (pagu efektif senilai

Rp 27.211.038.000,-) telah direalisasikan senilai Rp 4.101.629.963,- atau 15,13 % dengan sisa anggaran senilai Rp 23,006,089,037,-.(sumber: Aplikasi Sipka Setjen).

Realisasi berdasarkan Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan realisasi Pusdatin s.d Triwulan I tahun 2025 senilai Rp 4.101.629.963,-atau mencapai 4,27% terhadap Pagu Anggaran total dan sebesar 15,13% terhadap pagu efektif.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pusat Data dan Informasi pada periode-periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap seluruh progres IKU sesuai dengan periode pengukurannya baik tahunan, semesteran dan triwulanan;
2. Meningkatkan penyerapan anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan; dan
3. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan;
4. Melakukan input capaian dan bukti dukung hasil evaluasi rencana aksi.
5. Menindaklanjuti kebijakan terkait dengan *automatic adjustment* pada pagu belanja K/L dan pengurangan anggaran TA 2025, berdampak pada keterbatasan kinerja organisasi kedepan, untuk itu Pusat Data, Statistik, dan Informasi melakukan peninjauan kembali pada Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi Tahun 2025, antara lain:
 - a. IKU.01: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (%):
 - 1) Target IKU Tahun 2025 yang semula 91% diturunkan menjadi 75%.
 - 2) Permasalahan:
 - a) Anggaran Pendataan KUSUKA dan Produksi Eselon I (Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDS

dan Ditjen PKRL saat ini diblokir, dan terkena pemotongan, sehingga belum ada kepastian anggaran akan dibuka blokirnya, yang berdampak pada biaya enumerator yang bertugas ke lapangan dan validator untuk melakukan validasi data tidak ada;

b) Pendataan Geospasial belum bisa dipastikan ketersediaan anggarannya.

b. IKU.02: Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks):

- 1) Target IKU Tahun 2025 yang semula 3,5 diturunkan menjadi 3.
- 2) Permasalahan: anggaran pengembangan dan sosialisasi aplikasi yang diblokir dan terkena pemotongan.

c. IKU.03: Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (%):

- 1) Target IKU Tahun 2025 yang semula 77% diturunkan menjadi 70%.
- 2) Permasalahan: dalam kunjungan dan monitoring layanan *Command Center* yang diharuskannya *onsite*, sedangkan anggaran kegiatan pada pengelolaan Pusat Kontrol Maritim diblokir dan terkena pemotongan.

d. IKU.04: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks):

- 1) Target IKU Tahun 2025 yang semula 3,2 diturunkan menjadi 2,75.
- 2) Permasalahan: anggaran untuk penyusunan kebijakan, manajemen dan tata kelola SPBE terkena pemotongan.

e. IKU.05: Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai):

Dalam RKAKL tidak ada anggaran untuk kegiatan ini, sehingga IKU ditiadakan.

f. IKU.06: Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%):

Untuk mengefisiensikan perhitungan capain kinerja, maka IKU ditiadakan.

- g. IKU.07: Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (%):
- 1) Target IKU Tahun 2025 yang semula 100 diturunkan menjadi 80.
 - 2) Permasalahan: IKU turunan dari BPISDKP ini, mengalami pemotongan anggaran.
- h. IKU.08: Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks):
- 1) Target IKU Tahun 2025 yang semula 3 diturunkan menjadi 2,5.
 - 2) Permasalahan: Anggaran kegiatan pendukung penyusunan dan penyiapan bahan penilaian kematangan keamanan Siber KKP terkena pemotongan.
- i. IKU.09: Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (%):
- 1) Target IKU Tahun 2025 sebesar 64,68%.
 - 2) Permasalahan:
 - a) Tidak ada anggaran untuk melakukan monitoring tingkat Maturitas Satu Data KKP;
 - b) Mengikuti kebijakan dari Satu Data Indonesia Bappenas namun tidak ada penilaian internal KKP.
- j. IKU.10: Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai):
 Anggaran kegiatan penyusunan Grand Desain Arsitektur dan Peta SPBE KKP, mengalami pemotongan, sehingga IKU ditiadakan.
- k. IKU.11: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai):
 Permasalahan:
 - a) Anggaran untuk melakukan monitoring tingkat EPSS mengalami pemotongan;
 - b) Mengikuti kebijakan dari BPS namun tidak ada penilaian internal KKP.
 Dikarenakan permasalahan di atas, maka IKU ditiadakan.
- l. IKU.12: Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks):
- 1) Target IKU Tahun 2025 yang semula 4,6 diturunkan menjadi 4.
 - 2) Permasalahan:

- a) Anggaran untuk melakukan monitoring dan kunjungan lapangan ke UPP mengalami pemotongan;
 - b) Mengikuti kebijakan dari Kementerian PANRB.
- m. IKU.13: Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai):

Permasalahan:

- a) Anggaran untuk melakukan monitoring dan kunjungan lapangan ke UPP mengalami pemotongan, sehingga mengikuti kebijakan dari Ombudsman saja;
- b) Nilai capaian tahun 2024 sebesar 90,15 dapat berubah jika terdapat rekomendasi yang tidak di tindaklanjuti.

Dikarenakan permasalahan di atas, maka IKU ditiadakan.

- n. IKU.14: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)
- 1) Target IKU Tahun 2025 yang semula 89,6 diturunkan menjadi 82,46.
 - 2) Permasalahan:
 - a) UPP tidak dapat melakukan perbaikan atas 9 unsur kepuasan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik;
 - b) Anggaran untuk melakukan maintenance aplikasi mengalami pemotongan.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aulia Riza Farhan**
 Jabatan : Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
 Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
 Kepala Pusat Data, Statistik dan
 Informasi


 Rudy Heriyanto Adi Nugroho


 Aulia Riza Farhan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Data, Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (%)	91
		2	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		3	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (%)	77
		4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,2
		5	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77
		6	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	90
		7	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (%)	100
		8	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3
		9	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (%)	64,68
		10	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3
		11	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,7
		12	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6
		13	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87
		14	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6
2		15	Nilai PM SAKIP Pusdatin (nilai)	87

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik dan Informasi	16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (%)	100
	17	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (%)	100
	18	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	87
	19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (%)	85
	20	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (%)	95

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Data dan Informasi	Rp. 28.474.420.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	Rp. 67.675.001.000
Total Anggaran Pusat Data, Statistik dan Informasi Tahun 2025		Rp. 96. 149.421.000

Jakarta, 29 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi



Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Aulia Riza Farhan

Lembar Pengesahan	
Ketua Tim Kerja HSDMAOK	

Lampiran dokumen pendukung:

Tabel 46. Lampiran Dokumen Pendukung

No.	Dokumen	Bukti Link
1.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/SJ Tahun 2025 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Lampiran
2.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/SJ Tahun 2025 Tentang Tim Harmonisasi Data Perizinan dan Operasional <i>Command Center</i>	
3.	Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan periode Triwulan I Tahun 2025	
4.	Penyampaian Capaian Produksi Perikanan Triwulan I Tahun 2025	
5.	Hasil Rapat Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja Level I dan II Triwulan I Tahun 2025 lingkup Sekretariat Jenderal	
6.	Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Triwulan I	
7.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2025	
8.	Salinan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/MEN-KP/KP.430/III/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Eselon II dan Jabatan Administrasi Setara Eselon Iii di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	
9.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja	

	Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2025	
10.	Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024	
11.	Laporan Dialog Kinerja Triwulan I Tahun 2025	



PUSAT DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN